

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PRAKTIK  
OTONOMI DESA**

**(studi kasus di desa wanareja kecamatan rimbo ulu kabupaten tebo)**

*Skripsi*

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
Dalam Hukum Tatanegara  
Pada Fakultas Syariah**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN**

Oleh:

**J A M B I**

**ABDUL MUSANIF  
SPI. 130113**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI  
1438H/2018M**



**Pembimbing I** : Dr. Bahrul Ulum, MA  
**Pembimbing II** : Drs. Asri Neldi  
**Alamat** : Fakultas Syariah UIN Jambi  
Jl. Jambi - MA. Bulian KM.16 SIMP. Sungai Duren.  
Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0741) 582021

Jambi, 12 September 2018

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
Di-

JAMBI



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi Abdul Musanif yang berjudul "**PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PRAKTIK OTONOMI DESA DI DESA WANAREJA KECAMATAN RIMBO ULU KABUPATEN TEBO**" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.  
*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Pembimbing I

  
Dr. Bahrul Ulum, MA  
NIP. 197007271996031001

Pembimbing II

  
Drs. Asri Neldi  
NIP. 195502181983031003



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raya Jambi- Ma.Bulian, Simp. Sei Duren Telp. (0741) 582020

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Musanif NIM SIP. 130113 dengan judul "Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Praktik Otonomi Desa di Desa Wanareja Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo" yang dimunaqasyahkan oleh Sidang Fakultas Syariah UIN STS Jambi pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 24 Juli 2018  
Jam : 09.45 – 10.20.WIB  
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Syariah Gedung A Lantai 1

Telah diperbaiki sebagaimana hasil sidang Munaqasyah di atas dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, 24 Juli 2018

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Fuad Rahman, S. Ag., M. Ag ( )  
NIP. 197301302000001001

Sekretaris Sidang : Zarkani, S. Ag ( )  
NIP. 197603262002121001

Penguji I : Nuraida Fitrihabli, M. Ag ( )  
NIP. 197709152003122004

Penguji II : Abdul Razak, S. H., M. IS ( )  
NIP. 198002072009011007

Pembimbing I : Dr. Bahrul Ulum, MA ( )  
NIP. 197007271996031001

Pembimbing II : Drs. Asri Neldi ( )  
NIP. 195502181983031003

Dekan Fak. Syariah

Dr. A. A. Miftah, M. Ag  
NIP. 197311251996031001

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

❖ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat (QS: An-Nisaa ayat. 58)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

## ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengungkap penerapan prinsip *Good Governance* di desa Wanareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo. Sebagai tujuan antaranya untuk mengetahui, penerapan prinsip *Good Governance*, kendala yang ditemui dalam penerapan prinsip *Good governance* dan upaya yang diambil dalam menangani kendala dalam penerapan prinsip *Good governance* desa Wanareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: (1) Penerapan prinsip *Good Governance* di desa Wanareja Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo, di antaranya: kurangnya transparansi pembangunan, kurangnya pertanggungjawaban pembangunan, responsibilitas, independensi, kesetaraan dan kewajaran dan yang harus ditingkatkan adalah transparansi dan responsibilitas, dengan keterbukaan pembangunan dari mulai, perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan perawatan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat semakin meningkat dan juga tanggap dalam mengambil langkah terhadap pembangunan yang telah rusak di desa Wanareja; (2) Ada dua kendala dalam penerapan prinsip *Good Governance* di desa Wanareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo di antaranya; minimnya partisipasi masyarakat, di mana masyarakat kurang berpartisipasi dalam hal pembangunan desa, seperti bergotong-royong, membersihkan rambu-rambu jalan dan juga mengalirkan air yang tidak mengalir diselokan jalan, ini disebabkan masyarakat sibuk bekerja untuk mencari nafkah keluarga dan terbatasnya SDM yang memadai, di mana ada beberapa perangkat desa yang masih tidak menguasai teknologi dengan baik, sehingga kualitas pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan harapan masyarakat; (3) Ada dua upaya yang dilakukan dalam menangani kendala dalam penerapan prinsip *Good Governance* di desa Wanareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo, di antaranya: peningkatan disiplin kerja, di mana mewajibkan kepada seluruh perangkat desa Wanareja untuk datang ke kantor desa Wanareja pukul 07.00 WIB, yang dibuktikan dengan absensi serta memberikan hukuman bagi pelanggarnya dan mengikuti pelatihan, di mana pelatihan yang diselenggarakan oleh perangkat desa Wanareja kepada seluruh perangkat yang ada melalui seminar, workshop dan studi banding ke pualu Jawa dan daerah lainnya di Indonesia, yang diperuntukkan agar kualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat semakin membaik, sehingga kepercayaan pun akan semakin meningkat dan menyadarkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di desa Wanareja.

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahirobbil 'alamin*

Puji sukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi nikmat kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh strata 1 (S1) Shalawat beserta salam tidak lupa pula kukirimkan kepada junjunganku Muhammad Rasulullah SAW

“Pengetahuan yang benar tidak diukur dari sebanyak anda menghafal dan seberapa banyak yang mampu anda jelaskan, melainkan pengetahuan yang benar adalah ekspresi keshalehan (melindungi dari pada apa yang Allah SWT larang dan bertindak atas apa yang Allah SWT amanatkan) R.A. Abu Na'iam”

Kuibaratkan karya kecilku ini bak serantai mawar yang wanginya akan tetap teringat sepanjang hayat, meski kelak raganya akan lekang terlengser waktu, dan kupersembahkan mawar ini untuk:

Ayahku terhebat Munari, ilmu yang kauberikan dan mendidikku dengan titik-titik dan berubah menjadi kalimat sehingga kupergunakan untuk mencari ridho di jalan Allah SWT

Ibuku terindah Santini yang mengasuhku dan memberikan warna pelangi di dalam hidupku hingga kujelajahi dunia yang begitu luas

Adikku Ainul Bariatun Nikmah terbaik yang telah mengisi hari dengan canda tawa dan senyuman terindah yang pernah kumiliki.

Sahabat dekatku abang Adang Ridwan Mulyana, keluarga besar IKP.PI Kera Sakti, keluarga besar Bongso Kerto Soyo, dan keluarga besar Sabar (Koko)

Serta teman-temanku Wahdah, Wanto, Udin, Ansori, Khoirul Mizan, Rofiq, Rahmat, Serli Delarti Ayu, Utari Lesmana,(dll) yang telah menginspirasi dalam langkah gelap dan terang hidupku

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah rabbil alamin*, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat, hidayahnya, yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kemudian shalawat dan salam semoga tetap telimpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya kejalan yang benar dan dapat dirasakan manifestasinya dalam wujud Imam, Islam dan amal nyata yang *shalih likulli zaman wa makan*.

Skripsi ini diberi judul **“Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Praktik Otonomi Desa (Studi Kasus di Desa Wanareja Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo)”** merupakan suatu kajian terhadap penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam praktik otonomi desa sebagai abdi masyarakat. Dan inilah yang diketengahkan dalam skripsi ini.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam pengumpulan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada yang terhormat:



1. Bapak Dr. H. Hadri Hasan, MA selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Prof. Dr.A. A. Mftah, M, Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak H. Hermanto Harun, M. HI., Ph. D selaku Wakil Dekan I, Bidang Akademik, Ibu Dr. Rahmi Hidayati, S. Ag., M.HI, selaku Wakil Dekan II, Bidang Adminitrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ibu Dr. Yuliatin, S. Ag., M. HI, selaku Wakil Dekan III, Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
4. Bapak Abdul Razak, SHI., M.IS selaku Ketua jurusan Hukum Tatanegara di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
5. Bapak Dr. Bahrul Ulum, MA, dan Drs. Asri Neldi selaku selaku Pembimbing I dan selaku Pembimbing II skripsi ini di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN STS Jambi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu karyawan/karyawati di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
8. Sahabat-sahabatku jurusan Hukum Tatanegara angkatan 2013.
9. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat

memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita mohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, Februari 2018

Penulis,



Abdul Musanif  
SPI. 130113

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**SULTHAN THAHA SAIFUDDIN**  
J A M B I

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATAPENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	18
<b>BAB II     METODE PENELITIAN</b>	
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	23
B. Pendekatan Penelitian.....	23
C. Jenis dan Sumber Data.....	24
D. Unit Analisis .....	25
E. Instrumen Pengumpulan Data.....	27
F. Teknik Analisis Data.....	32
G. Sistematika Penulisan .....	35
<b>BAB III    GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Singkat Desa Wanareja.....	36
B. Visi dan Misi Desa Wanareja .....	38
C. Struktur Organisasi Desa Wanareja.....	40
D. Sarana dan Prasarana .....	43
<b>BAB IV    PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> di Desa Wanareja....	45
1. Kurangnya Transparansi Pembangunan.....	46
2. Kurangnya Pertanggungjawaban .....	50
3. Responsibilitas .....	53
4. Independensi .....	54
5. Kesetaraan dan Kewajaran.....	55

B. Kendala Yang Ditemui Dalam Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> desa Wanareja.....	57
1. Minimnya Partisipasi Masyarakat.....	57
2. Terbatasnya SDM Yang Memadai.....	61
C. Upaya Yang Diambil Dalam Menangani Kendala Dalam Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> .....	64
1. Peningkatan Disiplin Kerja .....	64
2. Mengikuti Pelatihan .....	67
 BAB V    PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran-Saran.....	73

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**CURRICULUM VITAE**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**SULTHAN THAHA SAIFUDDIN**  
 J A M B I

## BAB I

### PEMBAHASAN

#### A. Latar Belakang Masalah

*Good Governance* di Indonesia muncul di era reformasi. Hal tersebut muncul karena tuntutan terhadap keadaan pemerintah pada era Orde Baru dengan berbagai permasalahan yang terutama meliputi pemusatan kekuasaan pada presiden, baik akibat konstitusi (UUD 1945) maupun tidak berfungsi dengan baik lembaga tertinggi dan tinggi negara lainnya, serta tersumbatnya saluran partisipasi masyarakat dalam memberikan *control social*. Namun hingga saat ini *Good Governance* belum mampu berjalan dengan baik.<sup>1</sup> Masih banyak yang belum paham apa yang dimaksud dengan *Good Governance*.

Undang-undang No 6 Tahun 2014 atau yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Desa yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 merupakan perwujudan dari pengakuan dan penghormatan Negara terhadap desa dengan keberagaman yang dimilikinya. Di dalam Undang-Undang Desa perihal pembangunan desa terdapat dua hal yang menjadi kunci utama yaitu yang disebut dengan Desa membangun dan Membangun Desa.<sup>2</sup> Desa Membangun berarti desa memiliki kewenangan penuh dalam mengelola desanya sendiri.

---

<sup>1</sup>Heru Darmawan, *Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Desa*, hlm. 19.

<sup>2</sup>Djuni Pristianto, *Panduan Penyusunan RPJM desa*, (Jakarta: Yayasan Penabulu, 2015), hlm. 13.

Pemerintah desa bersama masyarakat desa bekerja bersama untuk memajukan dan mengembangkan desanya sendiri.<sup>3</sup>

Desa Membangun berarti desa tidak lagi menjadi objek pembangunan melainkan subjek pembangunan, Oleh Desa, Dari Desa, dan Untuk Desa. Kemendes mempunyai tanggung jawab penuh dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa demi mewujudkan kemandirian desa dan mengurangi kesenjangan antara desa dan kota.<sup>4</sup> Landasan digunakannya konsep *Good Governance* sebagai landasan nilai penyelenggaraan pemerintahan, yang berorientasi pada pengembalian harga diri rakyat demi membangun kembali citra pemerintahan sebagai pelayan yang adil. Governance merupakan pengaturan, yang dalam konteks *Good Governance* ada yang menyebut tata pamong.<sup>5</sup>

*Good Governance* dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ pemerintah dalam hal ini adalah pemegang saham atau pemilik modal, untuk meningkatkan usaha dan akuntabilitas pemerintah guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang undangan dan nilai-nilai etika.<sup>6</sup> Sedangkan *clean government* dapat diartikan sebagai pemerintahan yang bersih, yaitu bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta permasalahan-permasalahan yang lain terkait dengan

---

<sup>3</sup> Badan Ramdan dkk, *Abcd Perencanaan desa Bacaan Khusus Untuk Kaum Perempuan dan Masyarakat Miskin*, (Jakarta: Inisiatif, 2014), hlm. 6.

<sup>4</sup>Zulfikri Amanda, "Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa", <http://catatanpamong.blogspot.co.id/2014/01/undang-undang-no-6-tahun-2014-tentang.html>, diakses pada 10 Februari 2017

<sup>5</sup>Bediono, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, (Jakarta: Komite Nasional Kenijakan Governance, 2006), hlm. 3.

<sup>6</sup>Ismail Marzuki, "Good Corporate Governance Dalam Penyaluran Kredit Perbanka", *Jurnal Ilmiah IKIP MATARAM*, Dosen Program Studi Pendidikan Biologi FPMIPA IKIP Mataram, 2002. Hlm. 22.

pemerintahan.<sup>7</sup> Hadirnya *Good Governance* dalam pemulihan krisis di Indonesia menjadi mutlak diperlukan, mengingat *Good Governance* mensyaratkan suatu pengelolaan yang baik dalam sebuah institusi dan organisasi.

Dalam pencapaian yang berkesinambungan pelaksanaan prinsip *Governance* perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi.<sup>8</sup> Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* juga harus dilakukan dalam sistem pemerintahan untuk meningkatkan nilai, melindungi kepentingan stakeholders dan menjaga kepercayaan masyarakat sebagai lembaga intermediasi dan kepercayaan. Selain itu juga karena memiliki kekhasan dalam pengelolaannya. Alasan utamanya adalah karena adanya unsur 3K yang harus dipatuhi yakni *kepercayaan, keterbukaan, dan keberhatian*.<sup>9</sup> Oleh karena itu, pemerintahan terutama menerapkan *good governance* untuk tata pengelolaan sistem pemerintahan yang baik dan bisa melayani nasabah dengan baik pula dengan etos dan budaya kerja yang amanah dan jamaah.<sup>10</sup> Dalam *good governance*, terdapat 5 prinsip, yaitu: keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).<sup>11</sup>

Keadaan di dalam suatu desa tentunya sangat beragam atau bervariasi antara satu desa dengan desa yang lainya. Keberagaman desa dapat dilihat dari potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki, maupun sumberdaya manusia

---

<sup>7</sup>Muhamad Irfan, *Akuntabilitas dan Good Governance*, (Jakarta: Departemen Agama RI Sekretariat Jenderal Biro Organisasi Dan Tatalaksana, 2006), hlm. 5.

<sup>8</sup>Bintoro Tjokroamidjojo, *Good Governance Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 6.

<sup>9</sup>Yenny, "Prinsip-Prinsip Good Governance Studi Tentang Penerapan Prinsip – Prinsip Good governance Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kantor Camat Samarinda Utara Kota Samarinda", *Journal Ilmu Administrasi Negar*, 2013, hlm. 200.

<sup>10</sup>Bediono, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, hlm. 5.

<sup>11</sup>Kendarto dkk, *Panduan Komitmen Integritas*, hlm. 15.

(SDM) di daerah pedesaan tersebut. Beragam perbedaan diantaranya ada desa yang sangat potensial, ada juga memiliki jumlah dan kepadatan penduduk yang sangat kurang, ketersediaan Infrastruktur yang kurang memadai, tingkat pendapatan rendah, lokasi sangat jauh dari ibu kota kabupaten atau kecamatan, dan beragam karakteristik lainnya.<sup>12</sup>

Dari hasil obeservasi awal penulis dapat ditemukan khususnya pembangunan fisik desa di desa Wanareja mengalami pelaksanaan tata kelola pembangunan fisik desa yang masih jauh dari harapan. Pembangunan fisik yang bermasalah dapat dilihat pada pembangunan jalan umum, pembangunan jalan desa, pembangunan parit atau tanggul, dan pembangunan fisik lainnya. Desa Wanareja sendiri termasuk berada dalam lintasan jalan umum menuju lahan pertanian masyarakat desa lain. Pada beberapa bagian jalan masih banyak yang rusak, jalan desa belum dibuat dengan bagus, cepat mengalami kerusakan. Prinsip-prinsip *Good Governance*, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik, berbagai permasalahan timbul seperti penyimpangan anggaran, pembangunan fisik yang tidak sesuai dengan perencanaan.

Selain itu pula peranan kelembagaan desa dalam pelaksanaan *Good Governance* sebagian sudah berjalan sesuai harapan, namun masih banyak hambatan dan kendala di lapangan dalam pelaksanaanya. Pelaksanaan atau penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* di desa Wanareja Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo masih belum berjalan dengan baik seperti yang diharapkan oleh masyarakat, di mana aparat birokrasi daerah belum mampu menciptakan

---

<sup>12</sup>Ismail Marzuki, "Good Corporate Governance Dalam Penyaluran Kredit Perbanka", Jurnal Ilmiah IKIP MATARAM, Dosen Program Studi Pendidikan Biologi FPMIPA IKIP Mataram, 2002. Hlm. 22.



suatu sistem pelayanan yang baik bagi masyarakat. Hal ini tidak terlepas juga dari tingkat pemahaman dari seorang pemimpin itu sendiri dan khususnya kepala desa yang memiliki wewenang penuh atas pelaksanaan birokrasi di daerahnya tentang arti dan tujuan dari *Good Governance* itu sendiri.

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi tentang prinsip *Good Governance* di desa Wanareja yang bertempat di desa Wanareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo dengan judul **“Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Praktik Otonomi Desa (Studi Kasus di Desa Wanareja Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip *Good Governance* di desa Wanareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo?
2. Apa saja kendala yang ditemui dalam penerapan prinsip *Good Governance* desa Wanareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo?
3. Bagaimana upaya yang diambil dalam menangani kendala dalam penerapan prinsip *Good Governance* desa Wanareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo?

### **C. Batasan Masalah**

Untuk menghindari adanya perluasan masalah yang dibahas yang menyebabkan pembahasan menjadi tidak konsisten dengan rumusan masalah yang telah penulis buat sebelumnya, maka penulis memberikan batasan masalah ini hanya membahas mengenai penerapan prinsip *Good Governance* di desa Wanareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo.

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Dengan adanya semua perumusan masalah di atas, diharapkan adanya suatu kejelasan yang dijelaskan dan dijadikan tujuan bagi penulis dalam skripsi ini. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penerapan prinsip *Good Governance* di desa Wanareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo.
- b. Untuk mengetahui kendala yang ditemui dalam penerapan prinsip *Good Governance* desa Wanareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo.
- c. Untuk mengetahui upaya yang diambil dalam menangani kendala dalam penerapan prinsip *Good Governance* desa Wanareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai prinsip *Good Governance* di desa Wanareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

- a. Penelitian ini sebagai studi awal yang dapat menjadikan suatu pengalaman dan wawasan bagi penulis sendiri terhadap prinsip *Good Governance* di desa Wanareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo, serta menjadi bahan bacaan yang menarik bagi siapapun yang akan membacanya.
- b. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Setrata Satu (S1) di Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Siafuddin Jambi.
- c. Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan untuk di Fakultas Syari'ah khususnya jurusan Politik Islam dan dosen-dosen Fakultas Syari'ah lainnya.
- d. Sebagai sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademisi dan praktisi masyarakat di dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermamfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Penerapan *Good Governance***

*Governance* adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin masyarakat dan pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai pemerintahan. Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian *Good Governance* yang dikeluarkan beberapa pihak baik dalam perspektif yang sempit (*shareholder*) dan perspektif yang luas (*stakeholders*), namun pada umumnya menuju suatu maksud dan pengertian yang sama. Menurut Melisa Olivia Mamarimbing menyatakan bahwa;

*Good Governance* mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat (*society*). Dalam hal ini adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip

profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.<sup>13</sup>

Dari kutipan di atas dapat dicermati bahwa *Good Governance* merupakan suatu capaian yang perlu direncanakan oleh pemangku kebijakan dalam pemerintahan sehingga tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari tindak kejahatan korupsi. Demi terciptanya *Good Governance* dalam pemerintahan lebih-lebih pemerintahan dalam lingkup masyarakat maka perlu diterapkan dan ditingkatkan dengan cara menerapkan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.<sup>14</sup> Dalam Al-Qur'an, prinsip *fairness* ini dijelaskan dalam surat An-Nisaa ayat 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.<sup>15</sup>

Dari ayat Al-Qur'an di atas dapat dicermati bahwa suatu proses dan struktur yang digunakan oleh pemerintahan (Pemilik wewenang, Komisaris, dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan

<sup>13</sup>Melisa Olivia Mamarimbing “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pembangunan Fisik Desa (Studi Di Desa Tateli I Kec. Mandolang)”, hlm. 3.

<sup>14</sup>Thomas, “Good Governance dan Penerapannya di Indonesia”, Jurnal Administrasi Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Petra Surabaya, 2013, hlm. 6.

<sup>15</sup>Tim Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Qur'an Tafwid dan Tejemahan*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2008), hlm. 68.

akuntabilitas pemerintahan guna mewujudkan nilai pemerintahan dalam jangka panjang dengan cara memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.<sup>16</sup> Sebagaimana ditegaskan dalam hadits riwayat Bukhori Muslim sebagai berikut :

اللَّهُمَّ، مَنْ وَلِيَ مِنْ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْتَقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أُمَّرِ  
أُمَّتِي شَيْئًا فَارْفُقْ بِهِمْ، فَارْفُقْ بِهِ

Artinya: “Ya Allah, siapapun yang menjadi penguasa atas umatku pada suatu urusan, lalu mempersulit mereka, maka berilah kesulitan atasnya, dan siapapun yang menjadi penguasa atas umatku pada suatu urusan, lalu bersikap lembut kepada mereka, maka mudahkanlah urusannya.” (HR. Muslim).<sup>17</sup>

Dari hadis di atas dapat dicermati bahwa seorang pemimpin harus memberi panutan kepada bawahannya yang diperuntukkan untuk memberikan kelancaran dan kemudahan dalam mencapai pemerintahan yang baik, karna bila seorang pemimpin memudahkan bawahannya untuk mendapatkan sesuatu maka ia akan mendapatkan kemudahan dalam memimpin bawahannya.<sup>18</sup>

Berdasarkan definisi-definisi di atas, *Good Governance* secara singkat dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan pemerintahan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena *Good Governance* dapat mendorong

---

<sup>16</sup>Alwi Hasyim Batubara, “Konsep Good Governance Dalam Otonomi Daerah”, Jurnal Analisis Admisistrasi, 2006, hlm. 3.

<sup>17</sup> Friman Hidayat marwadi, “Masâil Asasiyyah Wathaniyyah”, <https://almarwadi.wordpress.com/2013/03/31/keputusan-komisi-a-ijtima-ulama-komisi-fatwa-majelis-ulama-indonesia-se-indonesia-iv-tahun-2012/>, diakses pada 12 Spetember 2017.

<sup>18</sup>Mustafa Abubakar, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER — 01 /MBU/2011, Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara, (Jakarta, Badan Usaha Milik Nega, 2011), hlm. 3.

terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan dan profesional. Penerapan *Good Governance* di pemerintahan akan menarik minat para investor, baik domestik maupun asing. Hal ini sangat penting bagi suatu pemerintahan yang ingin mengembangkan dan memajukan daerahnya masing--masing, seperti menambah wawasan baru.

## **2. Prinsip-Prinsip *Good Governance***

Di setiap pemerintahan harus memastikan bahwa prinsip *Good Governance* diterapkan pada setiap birokrat (pejabat) dan di semua jajaran. Terdapat prinsip-prinsip *Good Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran.<sup>19</sup> Berikut adalah penjelasan dari masing-masing prinsip tersebut;

### **a. Keterbukaan (*Transparency*)**

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.<sup>20</sup> Transparansi atau keterbukaan berarti keputusan yang diambil dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara atau mekanisme yang mengikuti aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh lembaga.<sup>21</sup> Itu artinya transparansi juga dapat dikatakan sebagai suatu komitmen untuk mengungkapkan secara jujur, terbuka dan komprehensif tentang informasi yang dibutuhkan oleh publik. Di dalam

---

<sup>19</sup>Bediono, *Pedoman Umum Good Governance Indonesia*, , hlm. 5.

<sup>20</sup>Rista Dewi Angraini, "Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya", jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 2011, hlm. 7.

<sup>21</sup>Dedi Harianto, "Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Perpustakaan (Ruu Perpustakaan)", [http://kelembagaan.perpusnas.go.id/Digital\\_Docs/homepage\\_folders/activities/hightlight/ruu\\_perpustakaan/naskah\\_akademis.htm](http://kelembagaan.perpusnas.go.id/Digital_Docs/homepage_folders/activities/hightlight/ruu_perpustakaan/naskah_akademis.htm), diakses pada 01 September 2016.

mengungkapkan keterangan-keterangan dan informasi informasi yang ada harus benar dan sesuai dengan realita serta tidak ada kebohongan dan kecurangan, karena data-data tersebut merupakan kesaksian, sebagaimana firman Allah SWT. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat At Taubah:119.

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصّٰدِقِينَ ﴿١١٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”.<sup>22</sup>

Selanjutnya Allah memperingatkan dari kesaksian dusta dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan:72

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿٧٢﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya”.<sup>23</sup>

Selama dalam pihak pelaksana perhitungan akhir dan pembuat neraca keuangan bersifat jujur, maka selama itu pula ia menjadi orang kepercayaan.<sup>24</sup> Transparansi kondisi keuangan dan kinerja pegawai desa merupakan salah satu upaya untuk mengurangi kesenjangan informasi (asymmetric information) sehingga publik dan para pelaku pasar dapat memberikan penilaian yang wajar dan dapat mendorong terciptanya disiplin pasar (market discipline)”. Menurut Kristianten ada beberapa aspek yang meliputi tercapainya transparansi sebagai berikut:

---

<sup>22</sup>At Taubah, (119)

<sup>23</sup>Al-Furqan, (72)

<sup>24</sup>Yusup Al Subailly, Fiqih Perbankan Syariah, Pengantar Fiqih Muamalah dan Aplikasinya Dalam Ilmu Moderen, (Universitar Islam Imam Muhammad Daud Fakultas Syariah, 2014), hlm. 5.

a) Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen

Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen merupakan tersedianya website yang diperuntukkan kepada nasabah untuk mengakses informasi, misalnya dalam bentuk dokumen-dokumen atau proses pelaksanaan kegiatan perencanaan penganggaran. Sementara pemerintah berkewajiban untuk membuka dan mempublikasikan dokumen dan kegiatan perencanaan penganggaran kepada masyarakat.

b) Kejelasan dan kelengkapan informasi

Kejelasan dan kelengkapan informasi merupakan penjelasan dalam hal informasi yang diinginkan, karena transparansi anggaran dapat difahami sebagai sebuah proses melalui mana pemerintah menyediakan, membuka akses, dan atau menyebarkan informasi terkait anggaran baik pada saat penyusunan, pelaksanaan maupun pada saat pertanggungjawabannya.

c) Keterbukaan proses

Keterbukaan proses merupakan adanya peluang bagi Masyarakat menggunakan haknya untuk menghadiri (*right to attend*), memantau (*right to observe*) atau bahkan memberikan masukan (*right to express*) dalam proses perencanaan, pembahasan atau pengambilan keputusan, monitoring dan evaluasi, atau proses pertanggungjawaban dan cara untuk memperbaiki basis data wajib pajak.

d) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Kerangka regulasi yang menjamin transparansi merupakan informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap warga negara. Informasi



yang dimaksud adalah informasi yang terkait dengan dokumen-dokumen dan kegiatan perencanaan penganggaran.

Dari pemaparan di atas maka dapat dicermati bahwa transparansi merupakan merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang perkembangan desa dan juga dapat memberikan pengaruh yang sangat penting terhadap kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini penulis akan menggunakan prinsip transparansi ini untuk menemukan penerapan aspek keterbukaan di desa Wanareja.

**b. Akuntabilitas (*Accountability*)**

Pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu pemerintah harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pemerintah dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.<sup>25</sup> Pedoman pokok dalam pelaksanaan prinsip Akuntabilitas ini adalah sebagai berikut :

- 1) Pemerintah harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ pemerintah dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.

---

<sup>25</sup>Lukas William Andypratama dan Ronny H. Mustamu, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Perusahaan Keluarga : Studi Deskriptif Pada Distributor Makanan”, Jurnal AGORA, Program Manajemen Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Kristen Petra, 2013, hlm. 3.

- 2) Pemerintah harus meyakini bahwa semua organ pemerintah dan semua karyawan mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan *Good Governance*.
- 3) Pemerintah harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- 4) Pemerintah harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran pemerintah yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran utama dan strategi perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
- 5) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ pemerintah dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

**c. Responsibilitas (*Responsibility*)**

Pemerintah harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.<sup>26</sup> Pedoman pokok dalam pelaksanaan prinsip Responsibilitas ini adalah sebagai berikut :

- 1) Organ pemerintah harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan pemerintah (*by-laws*).

---

<sup>26</sup>Bediono, *Pedoman Umum Good Governance Indonesia*, hlm. 6.

2) Pemerintah harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar pemerintah dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

**d. Independensi (*Independency*)**

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *Good Governance*, pemerintah harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ pemerintah tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Pedoman pokok dalam pelaksanaan prinsip Independensi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Masing-masing organ pemerintah harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- 2) Masing-masing organ pemerintah harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangundangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif.

**e. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)**

Dalam melaksanakan kegiatannya, pemerintah harus senantiasa memperhatikan kepentingan bersama berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.<sup>27</sup> Pedoman pokok dalam pelaksanaan prinsip Kesetaraan dan Kewajaran ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>27</sup>Bediono, *Pedoman Umum Good Governance Indonesia*, hlm. 5.

- 1) Pemerintah harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan pemerintah serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- 2) Pemerintah harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- 3) Pemerintah harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, jender, dan kondisi fisik

Dari penjelasan di atas bahwa, dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* yang ada diharapkan pemerintah bisa berjalan secara efektif dan efisien, sehingga kinerjanya menjadi optimal. Dalam hal ini penulis hanya menfokuskan pada prinsip transparansi atau keterbukaan dalam menemukan penerapan prinsip *Good Governance* di desa Wanareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo.

### **3. Tujuan Penerapan *Good Governance***

Tujuan dari *Good Governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan dan juga agar pemerintah dapat menjalankan praktik-praktik usaha yang sehat, kegiatan yang transparan dan terjaga keseimbangan antara upaya pencapaian tujuan ekonomi dengan tujuan

sosial-ekonomi perusahaan.<sup>28</sup> *Good Governance* lebih menekankan kepada proses, sistem, prosedur, peraturan yang formal ataupun informal yang menata suatu organisasi di mana aturan main yang ada harus diterapkan dan ditaati.<sup>29</sup>

Adapun tujuan dari *Good Governance* diantaranya:

- a. Birokrasi yang bersih, adalah birokrasi yang sistem dan aparaturnya bekerja atas dasar aturan dan koridor nilai-nilai yang dapat mencegah timbulnya berbagai tindak penyimpangan dan perbuatan tercela seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.
- b. Birokrasi yang efisien, efektif dan produktif, adalah birokrasi yang mampu memberikan dampak kerja positif (manfaat) kepada masyarakat dan mampu menjalankan tugas dengan tepat, cermat, berdayaguna dan tepat guna (hemat waktu, tenaga, dan biaya).<sup>30</sup>
- c. Birokrasi yang transparan, adalah birokrasi yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.
- d. Birokrasi yang melayani masyarakat, adalah birokrasi yang tidak minta dilayani masyarakat, tetapi birokrasi yang memberikan pelayanan prima kepada publik.

---

<sup>28</sup>FCGI, *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*, (Jakarta: Citra Graha, 2011), hlm. 23.

<sup>29</sup>Oldest, "Good Governance dan Prinsip Governance", <http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2015/12/pengertian-dan-prinsip-good-governance.html>, diakses pada 05 Juli 2016.

<sup>30</sup>CUI-ITB, "Keterkaitan Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pencapaian Good Governance", *Jurnal Perencanaan Kota dan Wilayah*, 2004, hlm. 40.

- e. Birokrasi yang akuntabel, adalah birokrasi yang bertanggungjawab atas setiap proses dan kinerja atau hasil akhir dari program maupun kegiatan, sehubungan dengan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan.

*Good Governance* berorientasi kepada suatu proses, sistem, prosedur dan peraturan yang membuat suatu entitas bertindak dengan suatu kerangka atau panduan dalam rangka untuk mencapai tujuannya dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penciptaan kesinambungan antara tujuan ekonomis dan tujuan sosial, selain itu *Good Governance* dapat mengusahakan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang dapat memberi keuntungan bagi suatu entitas secara keseluruhan.<sup>31</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

Terdapat penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Violetta Jingga Tadikapury, mahasiswi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar, ditulis pada tahun 2011, dengan judul “*Penerapan Good Governance (GG) Pada PT Bank X Tbk Kanwil X*”,<sup>32</sup> Penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip tata kelola pemerintah (GG) terhadap pelaksanaan praktiknya yang dilakukan oleh perusahaan. Pada Prinsip tata kelola pemerintah yang baik (GCG)

---

<sup>31</sup> Taufik Efendi, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, (Jakarta: Pendayagunaan Aparatur Negara, 2008), hlm. 17.

<sup>32</sup>Violetta Jingga Tadikapury, “Penerapan Good Governance (GCG) Pada PT Bank X Tbk Kanwil X”, Skripsi: Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2011, hlm. 4.

di dalamnya terdapat prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, indenpendensi, dan kewajaran Penelitian ini dibangun pada keyakinan bahwa dengan diterapkannya *Good Governance* pada suatu pemerintah maka pemerintah tersebut memiliki pengelolaan yang baik salah satu bentuk dari tata kelola yang baik adalah pelaksanaan praktik CSR yang merupakan bentuk tanggung jawab bisnis yang berorientasi untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap keberadaan usaha untuk mendapatkan legitimasi publik. Pertanyaan penelitian utama dari studi ini adalah bagaimana pemerintah melakukan penerapan prinsip *Good Governance* yang merupakan salah satu kunci sukses pemerintah untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenagkan persaingan bisnis global apalagi pemerintah pada penelitian ini sudah mampu berkembang sekaligus menjadi pemerintah terbuka.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan kuesioner. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peranan penting antara prinsip-prinsip *Good Governance* yang ada pada perusahaan, di mana dengan penerapan prinsip *Good Governance* maka diyakini akan menolong pemerintah secara umum dan perekonomian negara secara khususnya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi pemerintah adalah untuk melaksanakan prinsip *Good Governance* secara utuh, memenuhi harapan stakeholder, mendapatkan legitimasi, dan memenangkan penghargaan tertentu.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hidayatulla, mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, ditulis pada tahun 2013, dengan judul “*Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Fungsi Dan Tugas Badan Kepegawaian Daerah Pada Proses Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Cpn Di Kabupaten Barru*”,<sup>33</sup> Penelitian ini berfokus pada gambaran tentang Penerapan prinsip *Good Governance* dalam pengangkatan tenaga honorer kategori 1 menjadi CPNS di Kabupaten Barru, dan fokus pada prinsip transparansi dan akuntabilita. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai Penerapan prinsip *Good Governance* dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS di Kabupaten Barru. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara terhadap sejumlah informan, dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan teknik analisis data deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa implementasi prinsip *Good Governance* dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS telah terlaksana dengan baik namun belum maksimal. BKD telah melaksanakan pengangkatan tenaga honorer sesuai dengan prosedur berdasarkan PP No. 48 tahun 2005 jo. PP No.43 tahun 2007. Hal ini ditunjukkan dengan adanya data tenaga honorer yang terdata sesuai dengan persyaratan/prosedur yakni kesesuaian usia, masa kerja dan sumber pembiayaan. Namun, masih ada tenaga honorer yang mengaku bahwa

---

<sup>33</sup>Hidayatulla, “Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Fungsi Dan Tugas Badan Kepegawaian Daerah Pada Proses Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Cpn Di Kabupaten Barru”, Skripsi: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013, hlm. 4.



BKD tidak menyebarkan informasi secara transparan karena tidak begitu jelas dalam menyebarkan informasi penerimaan CPNS.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ekky Dwi Ferlinda dkk, mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, ditulis pada tahun 2012, dengan judul “*Implementasi Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan (Studi pada PT. Telkom Banyuwangi)*”,<sup>34</sup> Penelitian ini berfokus menganalisis dan mengetahui implementasi *Good Governance* dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada PT Telkom Banyuwangi. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan penjelasan kualitatif. Kemudian agar penelitian ini mempunyai bobot yang lebih tinggi maka penggarapannya juga menggunakan data kuantitatif yang saling melengkapi dan menunjang.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa PT Telkom dalam implementasi *Good Governance* mengelompokkannya berdasarkan lima penguatan prinsip *Good Governance* antara lain Transparency, Independence, Accountability, Responsibility, dan Fairness. Selain itu juga dengan adanya implementasi *Good Governance* maka Telkom melakukan upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanannya demi kepuasan para pelanggannya dengan cara Pemberlakuan SLG (Service Level Guarantee), pengelolaan dan pengembangan kompetensi SDM, pengembangan pendistribusian pelayanan dan produk, penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana, dan tata kelola TI yang sudah dilaksanakannya dengan sangat baik dan tepat. Akan tetapi implementasi *Good*

---

<sup>34</sup>Ekky Dwi Ferlinda dkk, “Implementasi Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Studi pada PT. Telkom Banyuwangi”, hlm. 1.

*Governance* dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada PT Telkom Banyuwangi ini tidak terlepas dari faktor penghambat yaitu kurangnya pemahaman para pegawai terhadap pentingnya *Good Governance* bagi PT Telkom Banyuwangi.

Penelitian tentang penerapan prinsip *Good Governance* kualitas kinerja pelayanan publik sudah pernah dilakukan baik di dalam negeri pada umumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Violetta Jingga Tadikapury (2011) dan Hidayatulla (2013) penelitian lebih menekankan pada penerapan prinsip tata kelola pemerintah (GCG) terhadap pelaksanaan praktiknya yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan Ekky Dwi Ferlinda (2012) lebih menekankan pada menganalisis dan mengetahui implementasi *Good Corporate Governance*. Tentunya setiap tempat dan seiringnya waktu berjalan dapat mempengaruhi hasil pada masing-masing peneliti dan dari ketiga penelitian ini akan penulis gunakan sebagai gambaran atau pemandu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun, penulis menfokuskan pada Sri Hidayatulla (2013). Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penulis menfokuskan pada penerapan prinsip *Good Governance* di desa Wanareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo.

## BAB II

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini tentang penerapan prinsip *Good Governance* di desa Wanareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo. Kegiatan penelitian ini dimulai sejak disahkannya penelitian ini. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Desa Wanareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo telah menerapkan *Good Governance* sehingga penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana cara penerapan *Good Governance* itu sendiri.
2. Adanya kemudahan untuk mendapatkan data dan informasi dan berbagai keterangan yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini.

#### B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti.<sup>35</sup> Sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui penerapan prinsip *Good Governance* di desa Wanareja. Menurut Sugiyono menyatakan bahwa “Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang

---

<sup>35</sup>Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 22.

alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci”.<sup>36</sup>

Kualitatif adalah suatu rencana dan cara yang akan digunakan peneliti untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen)<sup>37</sup> di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

### C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya.<sup>38</sup> Data yang penulis ambil dari informan *di lapangan* melalui observasi dan wawancara dilokasi penelitian.
2. Data skunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>39</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan obyek penelitian baik

---

<sup>36</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, hlm. 9.

<sup>37</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 9.

<sup>38</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 16.

<sup>39</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, hlm. 18.

yang berbentuk buku, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

Sumber data penelitian ini terdiri dari, manusia, situasi/ peristiwa, dan dokumentasi. Sumber data manusia berbentuk perkataan orang yang bisa memberikan data melalui wawancara. Sumber data yang berbentuk suasana/ peristiwa berupa suasana yang bergerak ataupun lisan, meliputi ruangan, suasana, dan proses. Sumber data tersebut merupakan objek yang akan diobservasi. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Peristiwa atau Kejadian

Dalam penelitian ini peristiwa dijadikan sumber data adalah penerapan prinsip *Good Governance* di desa Wanareja

b. Pelaksana pemberi pelayanan

Dalam hal ini seperangkat organisasi kepengurusan lembaga dapat memberikan informasi dapat dilakukan melalui wawancara dan lainnya.

c. Dokumentasi

Sumber data yang diambil dari dokumen ini berupa data dalam bentuk laporan, catatan peristiwa, keterangan, jumlah permasalahan serta keuntungan, dan lain sebagainya.<sup>40</sup>

#### **D. Unit Analisis**

Unit analisis dalam penulisan skripsi perlu dicantumkan apabila penelitian tersebut adalah penelitian lapangan yang tidak memerlukan populasi dan sampel. Unit analisis dapat berupa organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun

---

<sup>40</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, hlm. 16.

organisasi swasta atau sekelompok orang.<sup>41</sup> Unit analisis juga menjelaskan kapan waktu (tahun berapa, atau bulan apa) penelitian dilakukan, jika judul penelitian tidak secara jelas menggambarkan mengenai batasan waktu tersebut. Dalam skripsi ini penulis menggunakan unit analisis dengan analisis judul: “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Praktik Otonomi Desa (Studi Kasus di Desa Wanareja Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo).” Penelitian ini, unit analisisnya adalah penerapan prinsip *Good Governance* di desa Wanareja yang bertempat di desa Wanareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo. Penetapan unit analisis tersebut, karena penelitian yang dilakukan tidak menggunakan populasi dan sampel, namun hanya menggunakan dokumen-dokumen dari desa Wanareja yang bertempat di desa Wanareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo. dan informasi-informasi yang berasal dari karyawan atau pegawai di sana saja.

Dalam penelitian ini informan ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu cara pengambilan sampel dengan pertimbangan informasi.<sup>42</sup> Penentuan unit sampel dianggap telah memadai apabila telah sampai pada taraf kelebihan artinya bahwa dengan menggunakan informan selanjutnya boleh dikatakan tidak lagi diperoleh tambahan informasi baru.<sup>43</sup> Informan adalah orang yang memberi atau orang yang menjadi sumberdata dalam penelitian (narasumber). Informan adalah orang yang di wawancarai, diminta informasi oleh peneliti dan diperkirakan orang yang menjadi informan ini menguasai dan

---

<sup>41</sup>Sayuti Una (ed), *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jambi: Fakultas Syari’ah IAIN STS Jambi, (2012), hlm. 62.

<sup>42</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, hlm. 18.

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, hlm. 85.

memahami data, informasi, ataupun fakta dari objek penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kewenangan dan keilmuan yang terkait dengan penelitian ini, mereka diantaranya:

1. Kepala desa Pematang Balam (satu)
2. Kepala BPD desa Wanareja (satu)
3. Pegawai desa Wanareja (dua)
4. Masyarakat desa Wanareja (tiga)

#### **E. Instrumen Pengumpulan Data**

##### **1. Observasi**

Dalam observasi ini, penulis terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Hartinis Yamin menyatakan bahwa “dalam observasi partisipatif peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas mereka.”<sup>44</sup> Penelitian partisipatif ini kemudian dikhususkan lagi menjadi partisipasi pasif (*passive participation*) artinya peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

Alasan penggunaan pengamatan adalah karena teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung. Kedua karena teknik pengamatan memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Ketiga, teknik

---

<sup>44</sup>Hartinis Yamin, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Komplek Kejaksaan Agung, Cipaayung, 2009), hlm. 79.

pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposisional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data. Keempat, dapat mencegah bias yang biasanya terjadi pada proses wawancara. Kelima, teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasisituasi yang rumit. Obyek observasi menurut Spradley dinamakan situasi sosial, sebagaimana di kutip oleh Syamsudin terdiri atas:<sup>45</sup>

- a. *Place*, tempat di mana interaksi dalam situasi sosial sedang berlangsung.
- b. *Actor*, pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu.
- c. *Activity*, kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung.

Dalam penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka, penulis memilih observasi partisipan. Observasi partisipan yaitu suatu teknik pengamatan di mana peneliti ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diselidiki. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian, yaitu dengan meminta pandangan mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaksan penerapan prinsip *Good Governance* di desa Wanareja yang bertempat di desa Wanareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo. Observasi yang dilakukan penulis dalam skripsi ini terhadap subyek menggunakan pedoman observasi yang disusun sebagai berikut:

- 1) Mencatat kesan umum subyek: penampilan, pakaian, tingkah laku, cara berfikir
- 2) Interaksi sosial dan tempt lingkungan
- 3) Ekspresi saat wawancara

---

<sup>45</sup>Syamsudin dkk, *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia dan PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 238.



#### 4) Bahasa tubuh saat wawancara

### 2. Wawancara

Syamsudin dan Vismaia S. Damainti menyatakan wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>46</sup> Wawancara digunakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*) di mana pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.<sup>47</sup> Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan. Bedanya dengan semi terstruktur di sini adalah tidak memakai alternatif jawaban, namun pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

Wawancara ini termasuk wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial

---

<sup>46</sup>Syamsudin dan Vismaia S. Damainti, *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*, hlm. 238.

<sup>47</sup>Syamsudin dan Vismaia S. Damainti, *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*, hlm. 239.

yang relatif lama.<sup>48</sup> Langkah-langkah dalam wawancara menurut Lincoln dan Guba sebagaimana di kutip Sugiono terdiri dari 7 tahap, yaitu:<sup>49</sup>

- a. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilaksanakan.
- b. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan.
- c. Mengawali atau membuka alur wawancara.
- d. Melangsungkan alur wawancara.
- e. Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya.
- f. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan.
- g. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.

Alat-alat yang digunakan penulis dalam wawancara adalah buku catatan, laptop, tape recorder dan camera karena penulis menggunakan wawancara catatan lapangan. Hal ini bermanfaat untuk mencatat dan mendokumentasikan semua percakapan dengan sumber data, di mana kesemuanya telah digunakan setelah mendapat izin dari sumber data. Karena wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode wawancara yang dilakukan kepada subyek dengan menggunakan dokumentasi catatan lapangan. Adapun pedoman wawancara yang telah disusun sebagai berikut:

- 1) Latar belakang, lingkungan dan aktivitas dalam penerapan prinsip *Good Governance* di desa Wanareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo.
- 2) Kegiatan dan aktivitas penerapan prinsip *Good Governance* yang bertempat di desa Wanareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo.

---

<sup>48</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, hlm. 233-234.

<sup>49</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, hlm. 233-237.

- 3) Berlangsungnya penerapan prinsip *Good Governance* di desa Wanareja yang bertempat di desa Wanareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo.
  - 4) Faktor pendukung penerapan prinsip *Good Governance* yang bertempat di desa Wanareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo.
  - 5) Kondisi sarana dan sumberdaya
  - 6) Hasil pencapaian dan harapan
3. Dokumentasi

Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber di desa Wanareja yang bertempat di desa Wanareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo, dari arsip dan dokumen baik yang berada di desa Wanareja yang bertempat di desa Wanareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo, yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Nasution menyatakan dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.<sup>50</sup> Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang di teliti.

Menurut Hartinis, “dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.”<sup>51</sup> Dokumentasi dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Teknik

---

<sup>50</sup>Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 143.

<sup>51</sup>Hartinis Yamin, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kualitatif dan Kuantitatif*, hlm. 219.

dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Adapun di dalam skripsi ini penulis mengumpulkan data mengenai sejarah, visi-misi, profil, serta bukti-bukti penerapan prinsip *Good Governance* di desa Wanareja yang bertempat di desa Wanareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo.

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Menurut Bogdan sebagaimana di kutip oleh Sugiyono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain.<sup>52</sup> Sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Analisis data dilakukan dengan menguji kesesuaian antara data yang satu dengan data yang lain. Fakta atau informasi tersebut kemudian di seleksi dan dikembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang penuh makna. Analisis data merupakan langkah yang terpenting dalam suatu penelitian. Data yang telah diperoleh akan dianalisis pada tahap ini sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis model Miles and Huberman. Menurut Miles and Huberman di dalam buku Sugiyono mengemukakan bahwa “aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus

---

<sup>52</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, hlm. 90.

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenu, ”<sup>53</sup> Aktivitas analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan mengambil kesimpulan lalu diverifikasi.

### 1. Reduksi Data

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Adapun data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui catatan lapangan dan wawancara, kemudian data tersebut dirangkum, dan diseleksi sehingga akan memberikan gambaran yang jelas kepada penulis.

### 2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah data direduksi adalah data display atau menyajikan data. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan. Penyajian data juga dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan antara kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative*

---

<sup>53</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, hlm. 95.

*text*, ”<sup>54</sup> Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah data teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan penulis untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik dan *nerwork* (jejaring kerja).

Dalam penulisan kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, tetapi yang paling sering digunakan adalah teks yang bersifat naratif dan di dalam skripsi ini peneliti menggunakan teks yang bersifat naratif. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai dengan sub bab-nya masing-masing. Data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, dari sumber tulisan maupun dari sumber pustaka. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teks yang bersifat naratif.

### 3. Kesimpulan/Verifikasi

Langkah yang terakhir dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.<sup>55</sup> Kesimpulan dalam penulisan kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya kurang jelas sehingga menjadi jelas setelah diteliti.

Dari ketiga metode analisis data di atas penulis menyimpulkan bahwa, ketiga metode ini yang meliputi reduksi data, penyajian data dan kesimpulan akan

---

<sup>54</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, hlm. 249.

<sup>55</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, hlm. 252.

penulis lakukan setelah semua data telah diperoleh melalui wawancara catatan lapangan, dan juga memudahkan penulis di dalam mengetahui dan menarik kesimpulan terhadap penerapan prinsip *Good Governance* di desa Wanareja yang bertempat di desa Wanareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahasan dalam penulisan skripsi ini akan disistematisasi sebagai berikut:

Pembahasan diawali dengan BAB I, Pendahuluan. BAB ini pada hakikatnya menjadi pijakan bagi penulisan skripsi, baik mencakup background, pemikiran tentang tema yang dibahas. BAB I mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batsan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran, Tinjauan Pustaka.

BAB II dipaparkan, Metode Penelitian yang mencakup Pendekatan Penelitian, Jenis Dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Unit Analsis dan Alat Analisis Data, Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.

BAB III dipaparkan tentang gambaran umum tempat penelitian. Sejarah Berdirinya, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, dan Sarana dan Prasarana

BAB IV merupakan inti dari penulisan skripsi yaitu pemaparan tentang pembahasan dan hasil penelitian.

BAB V merupakan akhir dari penulisan skripsi yaitu BAB V penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, kata penutup serta dilengkapi dengan Daftar Pustaka, Lampiran dan Curriculum Vitae.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Singkat Desa Wanareja**

Desa Wanareja sebelumnya merupakan Unit Pemukiman Transmigrasi yang di sebut Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) X Kecamatan Perwakilan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo dengan penduduk 454 Kepala Keluarga yang berasal dari Jawa dan didatangkan oleh Pemerintah pada tahun 1978 secara bergelombang, gelombang 1 sampai dengan 5 dari bulan Juni sampai dengan Juli 1978. Untuk gelombang ke 3 khusus dari Intransum ABRI baik yang masih aktif maupun Purnawirawan dan keluarganya. Dan pendatang setelah itu disebut Transmigrasi Swakarsa atau Perkembangan. Bagi Transmigran Inti yang didatangkan oleh pemerintah mendapatkan tanah seluas  $\pm 5$  ha beserta rumah serta jaminan hidup selama 1 tahun tetapi bagi Transmigran Swakarsa hanya diberikan tanah seluas  $\pm 2$  ha tidak ada rumah maupun jaminan hidup khusus bagi yang masuk program Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) tahun 1993, 1994 dan 1995 mendapatkan tambahan rumah.

Pada awalnya dipimpin oleh seorang kepala Unit Pemukiman Transmigrasi (KUPT) Bapak Drs. Abdurrahman dan semenjak tahun 1979 Unit Pemukiman Transmigrasi diubah menjadi Desa dan Unit X berubah menjadi Desa Wanareja Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo dipimpin oleh seorang pejabat Sementara Kepala Desa Bapak S. Bakir, tahun 1983 s/d 1993 Kepala Desa dijabat Bapak Mardi Supangkat, tahun 1993 s/d 2001 Bapak Trimoyo, tahun 2001 s/d 2004 bapak Sunali, tahun 2004 s/d 2005 dijabat Pejabat Sementara Kepala desa



Bapak Hendra Budhiartapa dan tahun 2005 s/d 2011 dijabat oleh Bapak Hendra budhiartapa dan tahun 2011 s/d 2017 dijabat oleh Bapak Hendra Buadiartapa

Pada tanggal 12 Oktober 1999 terjadi Pemekaran Kabupaten sehingga kabupaten Tebo menjadi dua Kabupaten, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo. Desa Wanareja termasuk dalam wilayah Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo. Dan pada 16 April 2003 terjadi Pemekaran Kecamatan Rimbo Bujang menjadi tiga kecamatan Kecamatan Rimbo Ulu, Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Rimbo Ilir, Desa Wanareja termasuk wilayah Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo.

Desa Wanareja dengan luas 5.800 ha atau 5 km bujur sangkar pada saat sekarang dengan penduduk berjumlah 2.0 Kepala Keluarga (KK), 8.867 jiwa, laki-laki: 4.586 jiwa dan perempuan 4.281 jiwa dibagi menjadi 5 Dusun terdiri dari 6 RT, masing-masing Dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun dan masing-masing RT dipimpin oleh seorang ketua RT. Batas desa Wanareja adalah sebelah utara berbatasan dengan Desa Sido Rukun. Mata pencaharian penduduk pada umumnya Petani/ Pekebun dan sebagian juga PNS yang pada umumnya guru baik guru SD, SLTP maupun SLTA.

Tingkat Pendidikan bagi yang tua-tua pada umumnya SD namun bagi yang lahir 1980 keatas minimal SLTP bahkan sudah banyak yang menandang gelar Sarjana baik D2, D3, S1 baik dalam bidang pendidikan, Kesehatan, kebidanan, Keagamaan, Pertanian, peternakan dan Komputer bahkan ada yang telah mencapai S2 sebanyak 4 orang dan ada yang menjadi Dokter Umum 1 orang dan Dokter hewan 2 orang.

**Tabel 3.1**  
Kepala Desa Wanareja

No	Uraian	Jumlah
1	Drs. ABDURRAMAN	Tahun 1978-1980(selaku Kepla UPT Rimbo Bujang X)
2	S. BAKIR	Tahun 1982-1985
3	M. SUPANGKAT	Tahun 1985-1993
4	TRIMOYO	Tahun 1993-2001
5	SUNALI	Tahun 2001-2004
6	HENDRA BUDHIARTA	Tahun 2004-2005 (PJS, sebelumny Sekdes sejak 1993)
7	HENDRA BUDHIARTA	Tahun 2005-2011
8	HENDRA BUDHIARTA	Tahun 2012-2017

1. Perkembangan Desa Wanareja

Dilihat dari Gambaran Umum Desa Wanareja dapat diketahui bagaimana perkembangan desa semenjak terbentuk tahun 1978 yang bermula merupakan lokasi penempatan transmigrasi.

**B. Visi dan Misi Desa Wanareja**

1. Visi

Visi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Wanareja ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa Wanareja seperti pemerintahan Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan Rimbo Ulu mempunyai titik berat sektor infrastruktur. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Wanareja adalah:

## **“Terwujudnya Desa Wanareja Yang Aman, Tertib, Damai dan Sejahtera Menuju Pembangunan Yang Berkelanjutan”**

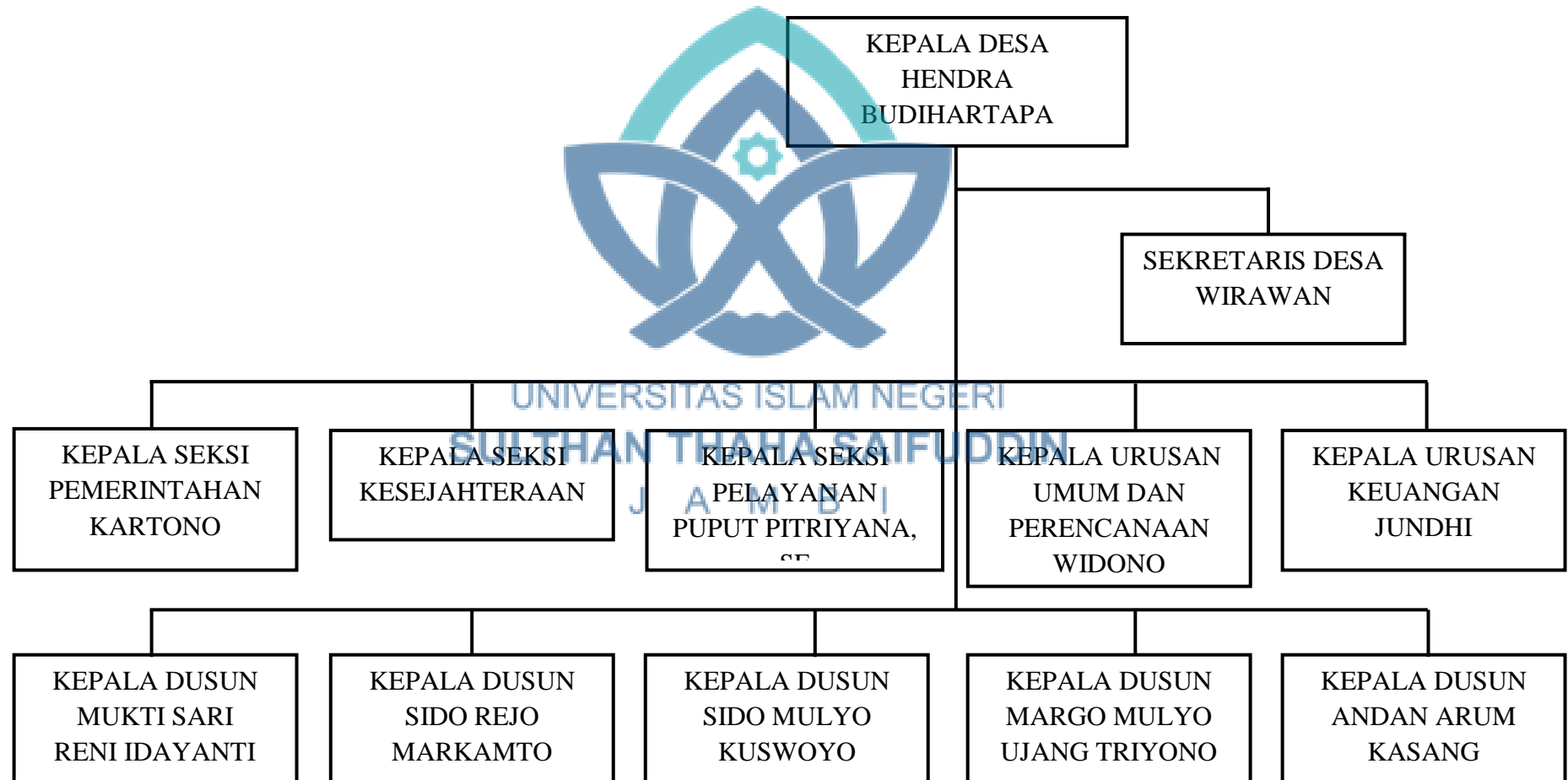
### 2. Misi

Selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasikan / dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan desa Wanareja, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Wanareja adalah:

- a. Mewujudkan pemerinthan Desa Wanareja yang efektif dan efisien dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan derajat idup masyarakat melalui upaya peningkatan pelayanan kesehatandes.
- c. Mengembangkan sektor pertanian dan sektor usaha industri kecil yang berwawasan lingkungan.
- d. Mengembangkan pentingnya peningkatan Sumber Daya Manusia melalui program dukungan wajib belajar 9 tahun.
- e. Mengidupan dan meningkatkan kembali kegiatan lembaga lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.

## 2. Struktur Organisasi Desa Wanareja

### STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA WANAREJA



### 3. Gambaran Umum Desa Wanareja

#### Gambaran Umum Desa Wanareja

Luas Desa	58 km <sup>2</sup>
Batas Desa	Sebelah Utara Desa Sumber Sari Sebelah selatan Desa suka Damai Sebelah timur Desa Perintis dan Kelurahan Wirotho Angung Sebelah barat Desa Sido Rukun
Jumlah Dusun	5 Dusun
Jumlah RW	14 RW
Jumlah RT	68 RT
Jumlah Penduduk	8.867
Laki-laki	4.568
Perempuan	4.281
Jumlah KK	2.680

Sumber : Desa Wanareja 2017

### 4. Keadaan masyarakat di Desa Wanareja

- a. Jumlah Penduduk : 8.867
- Laki-laki : 4.586
- Perempuan : 4.281
- Jumlah Kepala keluarga : 2.680

b. Keadaan

Mayoritas bermata pencaharian petani / pekebun karet maupun kelapa sawit, sebagian kecil PNS dan pedagang, sedangkan keadaan ekonomi masyarakat rata-rata telah mapan

### 5. Peran Pemerintahan Desa Dalam Menerapkan *Good Governance*

- a. Mengutamakan pelayanan kepada masyarakat

- b. Bermitra dengan BPD dan setiap kebijakan yang akan dilaksanakan sebelumnya melalui musyawarah mufakat bersama, perangkat desa, BPD, Ketua RT dan lembaga yang ada di desa.

#### **6. Presepsi Masyarakat Terhadap *Good Governance* di desa Wanareja**

Persepsi kita bersifat relative, oleh karena itu kemungkinan persepsi bisa berbeda-beda mengingat jumlah penduduk dan luas wilayah desa, namun selama ini dapat dirasakan oleh pemerintah desa persepsi masyarakat pada umumnya merasa cukup.

#### **7. Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan *Good Governance* di Desa Wanareja**

1. Meningkatkan sumber daya manusia terutama bagi perangkat desa.
2. Selalu memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat sehingga dapat membuat kebijakan yang diperlukan.

#### **8. Faktor Yang Menyebabkan Terhambatnya *Good Governance* di Desa Wanareja**

1. Jumlah penduduk yang cukup besar dan luas wilayah desa
2. Tingkat pendidikan dan pengetahuan yang mayoritas rendah
3. Lambatnya pemahaman sebagian masyarakat tentang informasi-informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa.

#### **9. Langkah Yang Diambil Dalam Mengatasi Terhambatnya *Good Governance* di Desa Wanareja**

1. Menyampaikan informasi-informasi terutama tentang kebijakan-kebijakan desa kepada masyarakat baik melalui Kepala Dusun, Ketua RT atau pada setiap

kesempatan yang ada misalnya pada pertemuan-pertemuan atau pengajian-pengajian.

2. Memfasilitasi keperluan-keperluan masyarakat yang membutuhkan.
3. Mengusulkan pemekaran desa yang pada saat ini masih dalam proses ditingkat kabupaten.

### 3. Sarana dan Prasarana Desa Wanareja

Kondisi sarana dan prasana umum desa Wanareja secara garis besar adalah sebagai berikut

#### 1. Sarana Pemerintahan

- Kantor Desa 1 unit
- Balai Desa 1 unit

#### 2. Saran Pendidikan

- PAUD 5 unit
- TK 7 unit
- SD 5 unit
- MIN 1 unit
- SMPN 1 unit
- MTS 1 unit
- SMAN 1 unit

#### 3. Sarana Kesehatan

- Pustu 1 unit
- Polindes 1 unit
- Posyandu Balita 7 unit
- Posyandu Lansia 3 unit

- Tenaga Perawat 1 orang
- Bidan 3 orang
- Dokter praktek 1 orang
- Sarana Ibadah
- Masjid 34 buah
- Mushola 31 buah
- Gereja 2 buah

**4. Sarana Olah Raga**

- Lapangan Sepak Bola 7 buah
- Lapangan Bola voli 10 buah
- Lapangan futsal 2 buah
- Lapangan Tenis Meja 11 buah

**5. Sarana Perhubungan, Listrik dan Telekomunikasi**

- Jalan tanah 10 km
- Jalan Perkerasan 72 km
- Jalan Aspal 17 km

Listrik Semua warga menggunakan listrik PLN

Tower Telkomsel 2 unit

**6. Sarana Ekonomi**

Pasar Desa 1 unit



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Penerapan Prinsip *Good Governance* di Desa Wanareja**

Berdasarkan penelitian *di lapangan* secara umum penerapan prinsip *Good Governance* di desa Wanareja Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan harus ditingkatkan kembali kinerja pemerintah desa. Ini didasari karena adanya beberapa indikator yang menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa Wanareja masih memiliki kendala dan hambatan dalam pembangunan desa, selain itu pula belum sepenuhnya efektif dan efisien dalam penyusunan APBDes sehingga pembangunan fisik yang bermasalah dapat dilihat pada pembangunan jalan umum, pembangunan jalan desa, pembangunan parit atau tanggul sehingga saat musim penghujan kendaraan roda dua, empat maupun roda enam tidak bisa berjalan dengan baik, selain itu pula minimnya penerangan lampu jalan secara menyeluruh sehingga mengakibatkan sering terjadinya pencurian, dan kecelakaan.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaba yang tepat, jelas, dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi dan nepotisme.

Dari hasil observasi dan wawancara penulis menemukan data terkait penerapan prinsip *Good Governance* di desa Wanareja Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo, di antaranya: kurangnya transparansi pembangunan, kurangnya pertanggungjawaban pembangunan, responsibilitas, independensi dan kesetaraan dan kewajaran, sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut:

### **1. Kurangnya Transparansi Pembangunan**

Dalam prinsip transparansi seharusnya seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan organisasi dapat berupa keterbukaan informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Bentuk transparansi yang dilakukan oleh perangkat desa Wanareja masih tergolong rendah, karena dalam pemantauan penulis dalam kinerja dan kegiatan dilakukan oleh pemerintah desa Wanareja tidak begitu sering melibatkan dan mengundang masyarakat dalam proses pengadaan barang jasa berjalan, hanya BPD setempat dan perangkat desa itu sendiri yang terlibat dan masyarakat hanya melihat hasil dari pembangunan desa itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh anggota BPD setempat. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Bapak Maryono selaku BPD desa Wanareja, sebagai berikut:

Saya akui kinerja sudah berjalan baik Mas, meskipun masih ada beberapa pembangunan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat atau rencana awal dalam pembangunan jalan dan lain-lain. Tentu itu semua terkendala dalam masalah anggaran, kalau anggaran yang turun dari pusat bisa diminimalisir dengan sebaik-baiknya tentu akan jauh lebih baik. Untuk masyarakat kita libatkan hanya perangkat dan RT, agar ikut serta membantu, masyarakat yang mengerti tentu akan ikut terlibat, kan masyarakat terkadang diajak kerja mereka sudah menanyakan berapa

bayarannya. Jadi terkadang kerjanya pun tidak begitu baik. Untuk keterbukaan memang masih kurang, saya akui. Maunya ada terobosan baru dalam pemberitahuan segala informasi pembangunan desa.<sup>56</sup>

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, kinerja yang dilakukan pemerintah desa Wanareja masih belum sepenuhnya seperti keinginan masyarakat. Karena masyarakat sebenarnya mengharapkan keterbukaan informasi terkait pembangunan yang dilakukan pemerintah desa Wanareja, agar masyarakat tidak berprasangka yang tidak baik kepada perangkat desa Wanareja. Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa masyarakat mengakui dalam hal administrasi dan surat menyurat sangat cepat, namun ada beberapa keinginan masyarakat terkait pembangunan jalan yang ada di desa Wanareja. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Tatik Rahmati selaku masyarakat desa Wanareja, sebagai berikut:

Kalau masalah surat menyurat atau ngurus yang lainnya, cepat Mas, saya senang kalau masalah surat atau acara-syukuran gitu pasti didukung, tapi kalau untuk pembangunan belum sepenuhnya bagus mas, soalnya kami kan sebagai pengguna saja. Jadi kami tidak tahu berapa anggaran dan berapa pemasukan atau pengeluaran, kalau ada informasi kan mungkin kita tidak berprasangka yang tidak-tidak.<sup>57</sup>

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, masih terbatasnya informasi terkait pembangunan dan juga anggaran yang dikelola desa Wanareja dalam membangun desa masih belum maksimal, karena masyarakat tidak dapat mengakses anggaran dan rancangan pembangunan desa Wanareja. Namun, dalam hal surat menyurat pemerintah desa Wanareja sangat mengutamakan keperluan masyarakat, sehingga masyarakat merasa terbantu dan menyukai kinerja dalam

---

<sup>56</sup>Wawancara dengan Bapak Maryono, BPD desa Wanareja di Kantor desa Wanareja, 21 September 2017.

<sup>57</sup>Wawancara dengan Ibu Tatik Rahmati, masyarakat desa Wanareja, 28 September 2017.

surat-menyurat. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Imam Wahyudin selaku masyarakat, sebagai berikut:

Menurut saya biasa-biasa saja, memang kalau untuk surat menyurat terkenal mas kepala desa, tidak ada sama sekali mempersulit, cepat dan hari itu langsung selesai. Masalah pembangunan ini mas, masih banyak jalan yang rusak dan agak lambat diperbaikinya. Terus juga kami tidak tahu gimana dan apa yang akan dilakukan untuk pembangunan jalan, soalnya di lorong belakang itu kan kurang penerangan, banyak anak muda yang kumpul di sana. Mereka ngapain saja kita tidak, tapi kalau terang dan jalannya bagus kan bisa lebih baik kedepannya.<sup>58</sup>

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, dalam pembangunan yang merata dan adanya keterbukaan yang dilakukan pemerintah desa Wanareja merupakan harapan masyarakat, dengan adanya keterbukaan maka akan meminimalisir perasangka yang tidak baik terhadap pemerintah desa Wanareja. Menurut Hendra Budihartapa selaku Kepala desa Wanareja, menyatakan bahwa dengan mengedapkan kebutuhan masyarakat akan membangun desa Wanareja lebih baik lagi, sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis sebagai berikut:

Kita berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, kami tentu berupaya terus mengundang berbagai elemen masyarakat ketika akan melakukan pembangunan di desa, meskipun hanya beberapa saja, seperti halnya pembangunan jembatan, paret jalan dan perairan untuk irigasi. Ini tujuannya untuk mendapatkan masukan dan informasi dalam pembangunan yang baik, selain itu pula nantinya mendapatkan pencerahan yang baru. Kalau untuk jalan itu memang telah kita upayakan semaksimal mungkin untuk perbaikan dan pengaplasannya dengan mengajukan proposal kepada atasan.<sup>59</sup>

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, dengan berbagai cara yang dilakukan pemerintah desa Wanareja agar terbentuk transparansi yang

---

<sup>58</sup>Wawancara dengan Imam Wahyudin, masyarakat desa Wanareja, 28 September 2017.

<sup>59</sup>Wawancara dengan Bapak Hendra Budihartapa, selaku Kepala desa Wanareja, 23 September 2017.

diharapkan masyarakat, dengan melibatkan sebagian masyarakat untuk ikut bekerja dalam pembangunan desa, memang masih tergolong jarang dan itu pun tidak semua masyarakat yang terlibat, namun dengan mengajak beberapa masyarakat akan menjadi perubahan yang maksimal untuk desa Wanareja, karena dalam transparansi dibutuhkan akuntabel yang menyeluruh. Dari hasil observasi penulis menemukan bahwa perlu dilakukan akuntabel yang terukur, di mana harus mempublikasikan seluruh aktivitas kepada masyarakat dan seluruh aktivitas yang dipublikasikan kepada masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan, di mana dalam perjalanan penerapan transparansi akan ada beberapa kendala yang muncul dari perbedaan pemahaman dan cara pandang masyarakat terhadap satu proses pembangunan yang akan dilaksanakan.

Bapak Widodo selaku Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, seharusnya ada keterbukaan tentang anggaran dana yang dijadikan pembangunan, agar masyarakat tidak berprasangka yang tidak-tidak. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara sebagai berikut:

Tentu kami harus berhati-hati dalam melaksanakan tugas Mas dan kami berupaya semampu kami untuk mencoba menjelaskan kepada masyarakat agar masyarakat tidak berprasangka yang lain, tapi semua itu ada wewenangnya pada kepala desa. Tidak mungkin saya akan mendahului kepala desa. Seharusnya ada keterbukaan dalam segala anggaran dan habis digunakan untuk pembangunan apa saja, namun yang terjadi masih saja ada tertutupan.<sup>60</sup> Kalau kami yang hanya perangkat desa yang ikut kepala desa saja Mas, hanya bisa memberikan masukan semampu kami saja dan keputusannya ada pada kepala desa. Namun untuk pembangunan kami terus berupaya mengupayakan keterbukaan kepada semua perangkat dan masyarakat yang ada. Kalau ada yang nanya tentu kami akan jelaskan.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bapak Widono, selaku Kepala Urusan Umum dan Perencanaan desa Wanareja, 24 September 2017.

<sup>61</sup>Wawancara dengan Bapak Kartono, selaku Kepala seksi pemerintahan desa Wanareja, 24 September 2017.

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, tercapainya pemerintahan yang baik maka diperlukan sistem transparansi yang baik, pada dasarnya selain transparansi dengan cara mengundang masyarakat pada saat musyawarah atau saat mengurus surat di kantor desa Wanareja. Untuk itu keterbukaan sangatlah penting, karena keterbukaan informasi publik diperuntukkan untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya mengembangkan partisipasi masyarakat.

## **2. Kurangnya Pertanggungjawaban**

Sebuah kewajiban yang dilakukan pemerintah desa adalah akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas kinerjanya, menjelaskan terhadap tiap-tiap tindakan dan keputusannya agar dapat disetujui maupun ditolak atau dapat diberikan hukuman bilamana ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perangkat desa Wanareja dalam pembangunan desa setempat dan alokasi anggaran pembangunan desa selalu berusaha sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik dalam kegiatan atau kinerja yang dilakukan untuk masyarakat tentunya dan keinginan mewujudkan pemerintahan yang baik. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Hendra Budihartapa selaku Kepala desa Wanareja, sebagai berikut:

Kalau untuk penyalahan anggaran, tentu kami siap bila ada ketimpangan dalam pekerjaan pada pembangunan desa yang diperuntukkan untuk masyarakat di sini menjadi sebuah permasalahan dan masyarakat mencoba menuntuk pada pekerjaan kami. Kalau ada jalan yang rusak tentu itu termakan oleh usia, kalau untuk membangun setiap jalan desa kami di sini

ini sangat sulit masalah anggaran, terkadang anggaran yang turun itu sangat minim sekali.<sup>62</sup>

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, perangkat desa akan mempertanggungjawabkan setiap pembangunan atau hasil kerja yang dinilai kurang baik atau tidak sesuai seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat. Dari hasil observasi penulis menemukan bahwa kepala desa Wanareja meyakini bahwa siap apabila ada ketidaksielarasan dana dengan pembangunan yang dibangun dan dalam pembangunan desa demi kepentingan masyarakat, semuanya itu tergantung dari anggaran atau dana yang diberikan oleh pemerintah untuk proses pembangunan yang dilakukan, sedangkan anggaran yang ada sangat minim dan terkadang kekurangan dalam proses pembangunan, sehingga proses pembangunan pun jadi terhambat dan karena memprioritaskan kesamaan maka pembangunan tidak begitu kokoh, sebagaimana dapat dilihat dari wawancara bersama Bapak Widono, selaku Kepala Urusan Umum dan Perencanaan desa Wanareja, sebagai berikut:

Ada beberapa dan tidak sedikit tentunya dari pengusaha swasta maupun lapisan masyarakat yang menanyakan bagaimana kinerja kami. Tentu kami akan mempertanggungjawabkannya, sebetulnya semuanya tergantung pada anggarannya Mas, kita prioritaskan semua jalan bagus, tapi karena terbatasnya dana maka tidak bisa bertahan lama apalagi mobil sawit juga sering lewat. Kalau dipikir-pikir sedikit mas, sedangkan komentar masyarakat banyak, intinya ya Mas, kami berupaya menggunakan sistem musyawarah dan kami juga memberikan info kepada masyarakat melalui muluk kemulut agar bisa dipertanggungjawabkan.<sup>63</sup>

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, ada beberapa pegnusaha atau masyarakat desa Wanareja menanyakan kinerja pemerintah desa,

---

<sup>62</sup>Wawancara dengan Bapak Hendra Budihartapa, selaku Kepala desa Wanareja, 23 September 2017.

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Widono, selaku Kepala Urusan Umum dan Perencanaan desa Wanareja, 24 September 2017.

dikarenakan belum adanya perkembangan yang signifikan. Ini didasari dengan adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki desa Wanareja menyebabkan tertundanya pembanguann yang ada, dan perangkat pemerintah desa Wanareja lebih mendahulukan mana yang menjadi prositas penting masyarakat, karena pernah terjadi untuk diratakan namun terjadi kerusakan yang cepat dalam segi bangunan jalan. Bapak Kartono, selaku Kepala seksi pemerintahan desa Wanareja juga menambahkan bahwa diperlukan adanya keselarasan pemikiran dalam pembangunan suatu daerah, sehingga mencapai pembangunan yang baik. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis sebagai berikut:

Kita siap Mas kalau disuruh mempertanggungjawabkan semuanya, karena kami melakukannya berdasarkan SOP dan kami juga membuat LPJ. Bisa dilihat semuanya di sana. Pemahaman yang penting, kami harus memberikan pemahaman terhadap masyarakat, terkait kinerja kami di sini. Kita tahu semua kalau sekarang sudah ada UU tentang desa, dan semuanya sudah ada prosedurnya di sana. Namun yang menjadi kendala adalah mayarakat masih saja tetap berpikiran yang tidak-tidak dengan pemerintah di sini, sedangkan diajak gotong royong masih banyak alasan.<sup>64</sup>

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, perangkat desa dalam melakukan pembangunanan desa dan anggaran terus diupayakan dengan sebaik-baiknya dan semuanya berdasarkan pada UUD desa, karena dengan begitu masyarakat akan mengetahui dengan adanya perundang-undangan yang baru ini dapat membantu dalam membangun desa agar lebih baik lagi. Karena ini merupakan perundangan yang baru masih terdapat beberpa kekurangan dari aspek pelaksanaan dan SDM yang ada. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara bersama Bapak Abdulah Hasibuan, masyarakat desa Wanareja, sebagai berikut:

---

<sup>64</sup>Wawancara dengan Bapak Kartono, selaku Kepala seksi pemerintahan desa Wanareja, 24 September 2017.



Pernah saya menanyakan terkait pembangunan yang ada di desa ini, kita tahulah gimana perkembangannya, semoga saja kedepannya lebih baik. Lagian saya juga pernah menanyakan tentang pertanggungjawaban dari pembangunan yang ada, mereka memang menemperkan di dinding pengumuman terkait LPJ pembangunan yang diadakan oleh pemerintah desa.<sup>65</sup>

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, dalam kejelasan dan pertanggung jawaban yang dilakukan pemerintah desa Wanareja dapat didapatkan saat masyarakat bertanya, namun tidak semua masyarakat akan menanyakan hal tersebut. Penulis menemukan bahwa dalam pemberian pertanggungjawaban yang telah dilaksanakan oleh erangkat desa dapat dilihat pada LPJ pembangunan.

### **3. Responsibilitas**

Semua pemerintah desa Wanareja mematuhi peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tanggungjawabnya masing-masing, baik itu terhadap masyarakat dan lingkungan, yang diperuntukkan dapat terpelihara kesinambungan dan kenyamanan dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan yang baik. sebagaimana dapat dilihat dari wawancara bersama Bapak Widono dan Kartono, sebagai berikut:

Kita terus tingkatkan kepatuhan dan kewajiban dalam melakukan tugas masing-masing pegawai di sini. Dengan menerapkan sistem reward dan punishment. Dan mereka juga harus melaporkan perkembangan kinerja mereka masing-masing.<sup>66</sup> Selaku pegawai kami tidak bisa sesuka kami dalam berkerja, semuanya sudah adang tanggungjawabnya masing-

---

<sup>65</sup>Wawancara dengan Bapak Abdulah Hasibuan, masyarakat desa Wanareja, 28 September 2017.

<sup>66</sup>Wawancara dengan Bapak Kartono, selaku Kepala seksi pemerintahan desa Wanareja, 24 September 2017.

masing, dari mulai datang, bekerja dan pulang. Semuanya sudah diatur di peraturan desa<sup>67</sup>

Hasil wawancara penulis di atas bahwa, organ pemerintah harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan desa dan melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di desa tersebut dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

#### 4. Independensi

Dalam pencapaian kemandirian yang dilakukan oleh desa Wanareja, terus mengupayakan kemandirian yang tidak terkait dengan instansi-instansi lain sehingga tidak mudah untuk dipengaruhi. Pihak bank harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ pemerintah tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Hendra Budihartapa selaku Kepala desa Wanareja, sebagai berikut:

Kami tetap berpacu pada ADART (Anggaran Dasar Rumah Tangga) yang melindungi kami, kami tetap berpacu pada aturan-aturan di dalamnya. Kami juga menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan.<sup>68</sup>

Hasil wawancara penulis di atas bahwa, setiap bagian bidang desa Wanareja harus melakukan kerjanya masing-masing dengan baik dan benar, tidak terpengaruh oleh bidang yang lain. Seyogyanya pekerjaan mereka telah terdapat

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak Widono, selaku Kepala Urusan Umum dan Perencanaan desa Wanareja, 24 September 2017.

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Hendra Budihartapa, selaku Kepala desa Wanareja, 23 September 2017.

aturan masing-masing, sehingga kecil kemungkinan untuk tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, jika mereka melakukan pelanggaran maka siap diberhentikan. Pegawai di desa Wanareja juga terus menjunjung tinggi nilai tanggung jawab, hingga kecil terjadi untuk melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain, ini yang menyebabkan terwujudnya sistem pengendalian internal yang efektif.

## **5. Kesetaraan dan Kewajaran**

Desa Wanareja terus mengupayakan kemajuan desa tersebut, dengan bahu membahu dalam mengerjakan tugas, tanpa mengganggu pekerjaan yang lain. Dalam melaksanakan kegiatannya, desa Wanareja senantiasa memperhatikan kepentingan bersama berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran yang dimiliki masing-masing pegawai desa Wanareja. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Hendra Budihartapa selaku Kepala desa Wanareja, sebagai berikut:

Kami tetap bekerja sama dengan desa-desa yang lain, atau dari kecamatan dalam memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan desa Wanareja serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.<sup>69</sup>

Hasil wawancara penulis di atas bahwa, dengan menerima masukan dari kecamatan pihak desa Wanareja dapat meningkatkan mutu kerja mereka dengan baik, karena dengan adanya saran yang membangun desa Wanareja ini tentu sangat terbantu dalam pencapaian misi untuk memajukan dan memberikan kebutuhan masyarakat luas. Menurut Bapak Maryono selaku BPD desa Wanareja

---

<sup>69</sup>Wawancara dengan Bapak Hendra Budihartapa, selaku Kepala desa Wanareja, 23 September 2017.

telah bekerja sama dengan baik sesama pegawai, dan terus menerima masukan satu sama lain terkait kinerja mereka tanpa membeda-bedakan. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersamanya sebagai berikut:

Sepengetahuan saya, menejer kami tidak pernah membedakan pekerjaan atas golongan ataupun ras, kami bekerja sesuai dengan bidang kami masing-masing, karena dengan begitu kami dapat menjalankan pekerjaan kami dengan baik, kalau kami tidak sesuai bidangnya maka kami akan kewalahan dalam menjalankan pekerjaan kami. Untungnya kami di sini dieperlakukan dengan baik, semua yang bekerja di sini pun begitu, kami tetap menerima kritik dan saran atas kehilafan kami, dengan adanya kotak saran yang ditaruh diruang kerja kami masing-masing kami menjadi lebih terbuka dengan perasaan dan keinginan kami. Dan kami sangat nyaman kerja di sini.<sup>70</sup>

Hasil wawancara penulis di atas bahwa, pihak desa Wanareja memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada seluruh pegawai yang ada di sana, ini bertujuan agar manfaat pemerintah dapat dirasakan bersama dan dapat berkontribusi satu-sama lain. Dengan begitu dari jajaran yang paling tertinggi hingga terendah dapat bekerja dengan baik, manajer juga kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, jender, dan kondisi fisik, ini berdampak positif bagi masyarakat luas yang memiliki keahlian dibidangnya maka terbuka lebar untuk mendapatkan pekerjaan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat lima penerapan prinsip *Good Governance* di desa Wanareja Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo, di antaranya: kurangnya transparansi pembangunan, di mana masyarakat tidak mengetahui mekanisme pembangunan di desa Wanareja, kurangnya

---

<sup>70</sup>Wawancara dengan Bapak Maryono, BPD desa Wanareja di Kantor desa Wanareja, 21 September 2017.

pertanggungjawaban pembangunan, di mana perangkat desa terkesan lambat dalam merespon pembangunan di desa Wanareja; responsibilitas, di mana pekerjaan yang dilakukan berdasarkan keputusan perangkat desa Wanareja; independensi, di mana tidak dipengaruhi oleh desa lain; dan kesetaraan dan kewajaran, di mana memberikan kesamaan hak dalam pelayanan dan yang harus ditingkatkan adalah transparansi dan responsibilitas, dengan keterbukaan pembangunan dari mulai, perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan perawatan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat semakin meningkat dan juga tanggap dalam mengambil langkah terhadap pembangunan yang telah rusak di desa Wanareja.

## **B. Kendala Yang Ditemui Dalam Penerapan Prinsip *Good Governance* desa Wanareja**

Dalam penerapan prinsip *Good Governance* sebagian pemerintahan mengalami kendala dalam penerapannya, karena dalam mewujudkan *Good Governance* bukanlah suatu hal yang mudah seperti membalik telapak tangan, dan tentunya untuk mewujudkan itu dibutuhkan perjuangan dan waktu panjang. Dari hasil observasi dan wawancara penulis menemukan data terkait kendala yang ditemui dalam penerapan prinsip *Good Governance* desa Wanareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo di antaranya; minimnya partisipasi masyarakat dan terbatasnya SDM yang memadai.

### **1. Minimnya Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam perkembangan dan pembangunan suatu desa, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui

lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi, mengawasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif dalam segala kegiatan di desa tersebut. Namun, bila suatu masyarakat tidak begitu terlibat dalam perkembangan suatu desa maka akan terjadi ketidakselerasian antara perangkat desa dan masyarakat. Minimnya partisipasi masyarakat di desa Wanareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo yang ikut serta dalam pembangunan merupakan kendala perangkat desa Wanareja dalam mencapai *Good Governance*, setempat seperti infrastruktur jalan, pendidikan dan mushola. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Hendra Budihartapa selaku Kepala desa Wanareja, sebagai berikut:

Sebenarnya kita berupaya mengajak partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan desa, seperti; jalan yang menjadi pusat mata pencarian masyarakat. Demi harapan agar ada kerjasama antara masyarakat dan pegawai pemerintahan dalam membangun desa ini lebih baik lagi, namun mereka terkadang memiliki kegiatan-masing untuk mencari nafkah keluarganya.<sup>71</sup>

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, bentuk partisipasi masyarakat di desa Wanareja masih tergolong rendah, namun dilain hal perangkat desa terus berupaya merangkul masyarakat dalam bentuk pembangunan jalan. Berdasarkan hasil observasi penulis menemukan bahwa pembangunan desa terutama jalan merupakan akses penting di daerah tersebut, sehingga pemerintah desa mengajak partisipasi masyarakat dalam pembangunannya dan juga perawatannya. Meskipun masih ditemui hanya beberapa masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan desa, karena masih terdapat unsur kekeluargaan. Bapak

---

<sup>71</sup>Wawancara dengan Bapak Hendra Budihartapa, selaku Kepala desa Wanareja, 23 September 2017.

Maryono selaku BPD desa Wanareja menambahkan, dengan adanya partisipasi masyarakat sangat membantu pembangunan desa. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara sebagai berikut:

Kalaulah ada dukungan dari semua masyarakat di desa ini, tentu semuanya akan cepat dalam hal pembangunan. Makanya kami terus berupaya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa, agar pemerintahan berjalan dengan baik. Terlepas dari peran serta masyarakat kami juga merangkul mahasiswa untuk menjalankan sistem pemerintahan yang baik, karena dengan adanya mereka dapat memberikan masukan yang positif untuk kemajuan pemerintahan ini.<sup>72</sup>

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, perlu adanya dukungan dari masyarakat dalam mencapai pembangunan yang baik, perangkat desa juga bekerja sama dengan mahasiswa untuk memberikan masukan. Maka diperlukan dukungan yang tinggi dari masyarakat serta partisipasi dalam pembangunan desa. Penulis menemukan bahwa dalam proses pembangunan jalan, gedung, pemukiman, mushola, sarana pendidikan, pengairan, dan bentuk pembangunan lainnya yang dilaksanakan di daerah sekitar desa Wanareja masih mengandalkan beberapa orang saja, minimnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, terutama selokan jalan, sedangkan ini merupakan hal yang penting dalam kelancaran air ketika hujan turun. Karena tanpa adanya bantuan dan partisipasi langsung dari masyarakat, pembangunan tidak akan berjalan dengan baik dan tidak akan sesuai dengan harapan dari masyarakat. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Bapak Kartono, selaku Kepala seksi pemerintahan desa Wanareja, sebagai berikut:

---

<sup>72</sup>Wawancara dengan Bapak Maryono, BPD desa Wanareja di Kantor desa Wanareja, 21 September 2017.

Biasanya bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan yang dilakukan di desa Wanareja berupa pengaduan tentang infrastruktur jalan yang rusak dan harus diperbaiki dan juga beberapa di antara mereka ikut andil dalam membangun infrastruktur tersebut saat sedang dibangun atau diperbaiki kembali. Jadi mereka itu memberikan informasi jika ada yang rusak saja, tapi untuk membantu merawat sepertinya belum.<sup>73</sup>

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, keterlibatan masyarakat terhadap proses pembangunan yang dilakukan perangkat desa Wanareja dalam hal ini hanya sebatas pengaduan dan sebagian yang terlibat dalam pembangunan, dengan kata lain masyarakat terlibat ketika proses pembangunan tersebut sudah berjalan bahkan sudah rampung, namun pada tahap proses pengwasan berjalannya pembangunan, masyarakat tidak banyak yang turut ikut berpartisipasi sehingga bentuk pengaduan yang dilakukan masyarakat bisa dikategorikan terlambat. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Bapak Widono selaku Kepala Urusan Umum dan Perencanaan desa Wanareja, sebagai berikut:

Hanya sebagian saja itu yang ikut serta bekerja, sedangkan banyak masyarakat di sini sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, contohnya kalau gotongroyong mereka ada sebagian yang tidak terlibat, sangsi yang kita lakukan hanya peneguran dan paling ketika nanti akan ada mengurus apa-apa kita tegaskan di sana.<sup>74</sup>

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, sebagian besar bentuk pembangunan yang dilakukan oleh perangkat desa tidak sesuai harapan masyarakat dikarenakan yang terlibat dari mulai proses perencanaan hingga rampungnya suatu pembangunan, masyarakat tidak ikut dalam pembangunan. Seharusnya tahap partisipasi di sini masyarakat ikut andil dalam proses

---

<sup>73</sup>Wawancara dengan Bapak Kartono, selaku Kepala seksi pemerintahan desa Wanareja, 24 September 2017.

<sup>74</sup>Wawancara dengan Bapak Widono, selaku Kepala Urusan Umum dan Perencanaan desa Wanareja, 24 September 2017.



pembangunan sudah dilakukan dari tahap perencanaan hingga selesainya proses pembangunan.

## 2. Terbatasnya SDM Yang Memadai

Terselenggaranya kegiatan pemerintah desa dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab maka akan mencapai target yang telah dicanangkan, namun bila sebaliknya justru akan menjadi kendala yang berkepanjangan. Indikatornya antara lain adalah pelayanan mudah, cepat, tepat dan murah. Dalam hal pemerintah desa Wanareja masih belum bisa menerapkan prinsip *Good Governance* desa Wanareja dengan baik, ini dikarenakan suberdya dan kesibukan perangkat desa masing-masing. Bapak Maryono selaku BPD desa Wanareja menambahkan, dengan adanya partisipasi masyarakat sangat membantu pembangunan desa. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara sebagai berikut:

Masih belum berjalan efektif saya akui, ini disebabkan pembangunan di desa ini banyak yang harus dibangun, namun anggaran yang turun dari pemerintah pusat itu nipis sekali dan terkadang kurang, sedangkan kebutuhan pembangunan tidak sedikit. Ditambah lagi dalam sistem administrasi masih ada yang mengandalkan orang lain, ini juga menjadi permasalahan di sini. Kurangnya pengalaman teknologi sebagian pegawai di sini.<sup>75</sup>

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, penerapan prinsip *Good Governance* desa Wanareja masih belum berjalan dengan baik, ini dikarenakan terbatasnya SDM yang memahami dalam penerapan prinsip *Good Governance*, sebagian besar dari mereka adalah pegawai lama yang masih butuh ilmu teknologi, sehingga terjadi limpahan pekerjaan pada segelintir orang saja di

---

<sup>75</sup>Wawancara dengan Bapak Maryono, BPD desa Wanareja di Kantor desa Wanareja, 21 September 2017.

kantor desa Wanareja. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Hendra Budihartapa selaku Kepala desa Wanareja, sebagai berikut:

Kita memang mengalami permasalahan dalam hal SDM di sini, sebagian ada yang sudah mau pensiun tapi karena ada unsur kekeluargaan yang masih tetap di sini. Itu yang menjadi kendala di sini, hingga terkadang perencanaan pembanguann itu tidak sesuai dengan prosesur yang benar, sehingga berdampak kepembangunan yang tidak berjalan dengan baik.<sup>76</sup>

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, SDM sangat memberikan pengaruh terhadap kinerja perangkat desa dalam membangun desa lebih baik lagi, karena dalam pembangunan desa saat SDM nya terbatas maka akan berdampak kepada pembangunan yang ada di desa tersebut. Ini yang mendasari belum efektif dan efisien kinerja dalam pembangunan desa Wanareja. Berdasarkan observasi penulis menemukan bahwa kendala SDM sanagt mempengaruhi perkembangan desa desa Wanareja karena karakter perangkat desa yang mana setiap perangkat mempunyai karakter-karekter yang berbeda, terkadang ketika diberikan pengarahan-pengarahan, memang bisa mereka dengarkan namun mungkin karena keterbatasan perangkat yang terkadang tidak bisa menerapkannya atau mengimplementasikannya. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama dengan Bapak Widono, selaku Kepala Urusan Umum dan Perencanaan desa Wanareja, sebagai berikut:

Banyak yang sudah lanjut usia, tapi karena ada keterkaitan ya mau gimana lagi, ada beberapa yang ikut pelatihan, tapi ya itu, masih ada perasaan ego dalam diri masing-masing, yang satu tidak mau dikasih tahu dan yang satu lagi kesal karena tidak didengarkan, jadi saling salah menyalahkan. Sebetulnya kalau ada kerjasama yang baik akan cepat membaik

---

<sup>76</sup>Wawancara dengan Bapak Hendra Budihartapa, selaku Kepala desa Wanareja, 23 September 2017.

pemerintahan di sini, hilangkan sistem keluarga yang selalu benar di sini, pasti lebih baik kedepannya.<sup>77</sup>

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, terkendalanya penerapan *Good Governance* didasari karena pengetahuan SDM yang memadai, keterbatasan atau kualitas SDM di mana setiap pegawai yang sudah melaksanakan pelatihan-pelatihan belum sepenuhnya menerapkan apa yang sudah dipelajari saat pelatihan. Kurang maksimalnya kerjasama yang dilakukan membawa akibat kepada kurang efektif dan efisiennya pekerjaan mereka. Bapak Kartono, selaku Kepala seksi pemerintahan desa Wanareja juga menambahkan, sebagai berikut:

Memang tidak semuanya di sini yang tidak pintar masalah pengaturan pembangunan desa di sini, tapi kalau untuk teknologi memang terkadang masih terkendala, tapi kalau untuk pengalaman mereka telah baik. Pembangunan desa di sini harus memilih dan memprioritaskan mana yang paling penting dulu dan yang tidak terlalu penting kita tunda dulu, tapi tetap akan kita pertimbangkan, jalan umum, selokan, aliran air, jembatan, masjid, tempat sekolah seperti TK dan lain sebagainya.<sup>78</sup>

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, dalam penerapan *Good Governance* akan mengalami permasalahan baik dari dalam pihak pelaksana desa dan juga masyarakat, untuk itu diperlukan cara dalam mengantisipasi dan menetapkan cara yang tepat dalam penderapan *Good Governance* sehingga tercapai desa yang bersih, tentram dan juga sejahtera.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kendala yang ditemui dalam penerapan prinsip *Good Governance* di desa Wanareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo di antaranya; minimnya partisipasi masyarakat, di mana masyarakat kurang berpartisipasi dalam hal pembangunan desa, seperti

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bapak Widono, selaku Kepala Urusan Umum dan Perencanaan desa Wanareja, 24 September 2017.

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Kartono, selaku Kepala seksi pemerintahan desa Wanareja, 24 September 2017.

bergotong-royong, membersihkan rambu-rambu jalan dan juga mengalirkan air yang tidak mengalir diselokan jalan, ini disebabkan masyarakat sibuk bekerja untuk mencari nafkah keluarga dan terbatasnya SDM yang memadai, di mana ada beberapa perangkat desa yang masih tidak menguasai teknologi dengan baik, sehingga kualitas pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

### **C. Upaya Yang Diambil Dalam Menangani Kendala Dalam Penerapan Prinsip *Good Governance***

Demi tercapainya pembangunan desa yang lebih baik, maka perlu dilakukan terobosan yang baik dalam pencapaian tersebut, sehingga *Good Governance* dapat tercapai dan memberikan dampak positif kepada masyarakat yang ada di desa tersebut. Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, wawancara serta dokumentasi menggunakan catatan lapangan, maka diperoleh data-data terkait upaya yang diambil dalam menangani kendala dalam penerapan prinsip *Good Governance* di desa Wanareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo, di antaranya: peningkatan disiplin kerja dan mengikuti pelatihan.

#### **1. Peningkatan Disiplin Kerja**

Disiplin kerja merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja pemerintahan desa Wanareja dalam melaksanakan tugas pokoknya. Melalui peningkatan disiplin kerja, hal ini dimaksudkan agar para pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-harinya senantiasa patuh dan taat pada berbagai ketentuan yang berlaku dan menunjukkan prestasi kerja yang tinggi.

Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Bapak Hendra Budihartapa, selaku Kepala desa Wanareja, sebagai berikut:

Sebagai pelaksana pembangunan desa, maka kami harus perbaiki dulu dari kualitas kerja perangkat desa yang ada, kami melakukannya dengan cara menerapkan disiplin yang tinggi, tentu disiplin tanpa konsekuensi hukuman bagi pelanggarnya tidak ada artinya, dan mereka akan menganggap remeh kalau tidak ada konsekuensinya. Untuk itu saya akan melalui beberapa tahap dalam penerapannya, yang teguran, peringatan dan pemberhentian perangkat desa yang telah melanggar dan tidak sesuai dengan sumpah sebagai abdi negara.<sup>79</sup>

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, dalam pencapaian *Good Governance* agar berjalan dengan baik, maka perangkat desa Wanareja menerapkan disiplin kerja yang tinggi, karena dengan disiplin yang tinggi akan memberikan dampak positif pada kinerja dan juga pada masyarakat setempat. Dari hasil observasi penulis menemukan bahwa disiplin yang tinggi dan memberikan hukuman bagi pelanggarnya pun telah diterapkan di pemerintahan desa Wanareja. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Bapak Kartono, selaku Kepala seksi pemerintahan desa Wanareja, sebagai berikut:

Bayak sekali kalau ditanya alasan, kita semua bisa memubatkan alasan, tapi kita harus berpatokan pada kebutuhan masyarakat. Memang tidak mudah mengubah perilaku orang yang biasa terlambat menjadi disiplin. Namun karena ada konsekuensinya dari pelanggaran disiplin pun, sebagian besar telah merubah perilaku di sini. Kepala desa pun sudah memberikan contoh baik dalam hal disiplin, sehingga kami tentu harus mengikuti pemimpin di sini, datang tepat waktu dan mengerjakan apa yang bisa dikerjakan di sini.<sup>80</sup>

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, konsekuensi yang diberikan dengan hukuman telah memberikan efek jera pada pemerintahan desa

---

<sup>79</sup>Wawancara dengan Bapak Hendra Budihartapa, selaku Kepala desa Wanareja, 23 September 2017.

<sup>80</sup>Wawancara dengan Bapak Kartono, selaku Kepala seksi pemerintahan desa Wanareja, 24 September 2017.

Wanareja, sehingga sebagian besar pegawai perangkat desa telah merubah prilakunya masing-masing untuk menerapkan kedisiplinan dalam diri mereka masing-masing. Terlebih lagi, kepala desa telah memberikan contoh yang positif pada jajaran pegawai di kantor desa Wanareja. Bapak Widono, selaku Kepala Urusan Umum dan Perencanaan desa Wanareja menambahkan bahwa:

Adanya disiplin kita akan lebih bertanggungjawab atas segala regulasi dan peraturan yang ada. Bukan hanya itu dengan meningkatkan disiplin maka masyarakat akan merasakan manfaatnya dari mulai pelayanan, pembangunan sesuai dengan UU desa yang telah digulirkan. Maka kedepannya pun sistem pemerintahan di sini akan menjadi lebih baik lagi.<sup>81</sup>

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, capaian keberhasilan pembangunan desa tentu harus didasari kedisiplinan yang tinggi, ini berdampak kepada pelayanan dan tanggungjawab perangkat desa Wanareja kepada masyarakat lebih baik lagi dengan begitu pembangunan yang merata dapat tercapai dengan baik sehingga transparansi yang diharapkan masyarakat desa Wanareja dapat terlaksana dengan baik. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara bersama Bapak Maryono, BPD desa Wanareja di Kantor desa Wanareja, sebagai berikut:

Dengan adanya evaluasi yang dilakukan perangkat desa, maka diputuskanlah peraturan yaitu kedisiplinan yang harus diutamakan dalam melaksanakan pekerjaan lebih lagi kebutuhan masyarakat di sini. Ada penekanan disiplin di sini, selain itu pula kami dituntut untuk menjalin kerjasama dan kedekatan yang baik antara pegawai di sini, dengan tegur sapa dan juga dengan bertukar pendapat terhadap permasalahan yang ada saat di meja rapat dengan kondusip, tanpa ada menjatuhkan dan juga harus saling menghargai satu sama lain selama dalam melaksanakan pekerjaan.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak Widono, selaku Kepala Urusan Umum dan Perencanaan desa Wanareja, 24 September 2017.

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Maryono, BPD desa Wanareja di Kantor desa Wanareja, 21 September 2017.

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, rapat evaluasi yang dilakukan memberikan dampak yang sangat positif karena ini dapat menignkarkan hubungan yang baik dan kerjasama dengan para pegawai dapat memberikan efek yang positif terhadap perangkat desa. Untuk itu setiap pekerjaan harus ada reward and punishment-nya. Termasuk perangkat atau aparat desa. Dari hasil observasi penulis menemukan bahwa perangkat desa harus datang pukul 07.00 WIB, yang dibuktikan dengan absensi, karena berbagai fasilitas yang diterima perangkat desa, juga semakin naik. Baik dari sisi pendapatan maupun fasilitas yang lain. Sehingga kinerja mereka juga harus meningkat. Caranya dengan membuat aturan agar dilaksanakan di lapangan.

## **2. Mengikuti Pelatihan**

Peningkatan wawasan perangkat desa Wanareja diperuntukkan agar meningkatkan profesionalisme kerja, lebih aktif dan efisien dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu pelatihan bagi perangkat desa Wanareja perlu dilakukan, karena dengan kegiatan tersebut akan terjadi peningkatan kemampuan pegawai, baik kemampuan profesionalnya, kemampuan wawasannya, kemampuan kepemimpinannya maupun kemampuan pengabdianya. Salah satu instrument penting dalam pengembangan sumber daya Perangkat pemerintahan desa Wanareja melalui pelatihan, sehingga mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih dan berwibawa dan mampu melaksanakan tugas umum pemerintahan maupun untuk menggerakkan pembangunan secara lancar, dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian terhadap masyarakat. Sebagaimana dapat dilihat

dari wawancara penulis bersama Bapak Hendra Budihartapa, selaku Kepala desa Wanareja, sebagai berikut:

Kita berupaya dalam penerapannya *Good Governance* dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan di dalamnya, namun semua itu tidak bisa dicapai dengan mudah, banya sekali kendala dan penghambat dalam kenyataannya, tapi kita juga tidak tinggal diam dalam menanganinya. Tentu semuanya butuh kerja keras dari pemerintah itu sendiri, namun yang perlu diperhatikan juga partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Untuk itu kami berupaya bergotong-royong secara berkala demi menyatukan visi dan misi desa agar lebih baik lagi melalui beberapa pelatihan agar semuanya terdidik dan tercerahkan. Dengan pemberian pelatihan pada perangkat desa, seperti menggunakan teknologi dan saat ini kita sudah punya website dan group facebook, jadi kita mencoba untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat terkait pembangunan dan perkembangannya.<sup>83</sup>

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, pelatihan sebagai salah satu bentuk upaya peningkatan kemampuan sumber daya perangkat desa Wanareja yang diselenggarakan dengan cara tepat akan memberikan dampak positif terhadap diri pegawai yang bersangkutan maupun bagi organisasi secara keseluruhan. Penulis menemukan bahwa saat ini desa Wanareja telah mempunyai *website* dan *group facebook* meskipun belum sepenuhnya dikelola dengan baik, namun telah memberikan dampak positif kepada masyarakat. Hampir dapat dipastikan bahwa dengan adanya pelatihan dapat menambah pengetahuan, keterampilan serta pengabdian sehingga dengan sendirinya akan dapat meningkatkan kemampuan administratif pegawai dalam meningkatkan pembangunan di desa Wanareja dan pada akhirnya juga akan membuka peluang yang lebih besar bagi perkembangan karier pegawai yang bersangkutan.

---

<sup>83</sup>Wawancara dengan Bapak Hendra Budihartapa, selaku Kepala desa Wanareja, 23 September 2017.



Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Bapak Kartono, selaku Kepala seksi pemerintahan desa Wanareja, sebagai berikut:

Bentuk pelatihan dalam pembuatan lapotan, surat dan juga teknologi agar menciptakan keterbukaan informasi desa Wanareja. Kami mengadakannya di kantor desa ini, di mana kami mengundang pakar IT dari kabupaten untuk memberikan cara agar dapat menambah pengetahuan teknologi bagi perangkat desa di sini.<sup>84</sup>

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, bentuk-bentuk pelatihan yang diselenggarakan oleh perangkat desa Wanareja kepada seluruh pegawai yang ada di desa Wanareja adalah Seminar, workshop dan studi banding. Penulis menemukan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk pencapaian kerja secara efektif dan efisien guna terwujudnya *Good Governance* adalah dengan diadakannya pelatihan-pelatihan khusus terutama untuk seluruh perangkat desa termasuk Kepala desa dalam bentuk manajemen kepemimpinan, untuk bagian keuangan dalam bentuk pelatihan pengelolaan keuangan, untuk yang lainnya juga dapat berupa sertifikasi barang dan jasa, dan untuk pegawai lainnya ada pengarahan-pengarahan langsung dari atasan agar kinerja perangkat desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Tidak luput juga dari kenyamanan yang dirasakan perangkat desa dalam kinerjanya. Kekompakan dan kerjasama juga membawa kinerja yang dilakukan oleh perangkat desa berjalan secara efisien. Meskipun demikian pelatihan telah berjalan baik di desa Wanareja namun masih perlu dilakukan evaluasi-evaluasi dan keragaman bentuk pelatihan yang dilaksanakan. Khususnya perangkat di desa Wanareja juga telah

---

<sup>84</sup>Wawancara dengan Bapak Kartono, selaku Kepala seksi pemerintahan desa Wanareja, 24 September 2017.

mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga pendidikan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua upaya yang dilakukan dalam menangani kendala dalam penerapan prinsip *Good Governance* di desa Wanareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo, di antaranya: peningkatan disiplin kerja, di mana mewajibkan kepada seluruh perangkat desa Wanareja untuk datang ke kantor desa Wanareja pukul 07.00 WIB, yang dibuktikan dengan absensi serta memberikan hukuman bagi pelanggarnya dan mengikuti pelatihan, di mana pelatihan yang diselenggarakan oleh perangkat desa Wanareja kepada seluruh perangkat yang ada melalui seminar, workshop dan studi banding ke pualu Jawa dan daerah lainnya di Indonesia, yang diperuntukkan agar kualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat semakin membaik, sehingga kepercayaan pun akan semakin meningkat dan menyadarkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di desa Wanareja.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penerapan prinsip *Good Governance* di desa Wanareja Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo, secara umum belum berjalan dengan baik, untuk itu secara khusus dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip *Good Governance* di desa Wanareja Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo, di antaranya: kurangnya transparansi pembangunan, di mana masyarakat tidak mengetahui mekanisme pembangunan di desa Wanareja, kurangnya pertanggungjawaban pembangunan, di mana perangkat desa terkesan lambat dalam merespon pembangunan di desa Wanareja; responsibilitas, di mana pekerjaan yang dilakukan berdasarkan keputusan perangkat desa Wanareja; independensi, di mana tidak dipengaruhi oleh desa lain; dan kesetaraan dan kewajaran, di mana memberikan kesamaan hak dalam pelayanan dan yang harus ditingkatkan adalah transparansi dan responsibilitas, dengan keterbukaan pembangunan dari mulai, perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan perawatan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat semakin meningkat dan juga tanggap dalam mengambil langkah terhadap pembangunan yang telah rusak di desa Wanareja.
2. Ada dua kendala dalam penerapan prinsip *Good Governance* di desa Wanareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo di antaranya; minimnya partisipasi

masyarakat, di mana masyarakat kurang berpartisipasi dalam hal pembangunan desa, seperti bergotong-royong, membersihkan rambu-rambu jalan dan juga mengalirkan air yang tidak mengalir diselokan jalan, ini disebabkan masyarakat sibuk bekerja untuk mencari nafkah keluarga dan terbatasnya SDM yang memadai, di mana ada beberapa perangkat desa yang masih tidak menguasai teknologi dengan baik, sehingga kualitas pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

3. Ada dua upaya yang dilakukan dalam menangani kendala dalam penerapan prinsip *Good Governance* di desa Wanareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo, di antaranya: peningkatan disiplin kerja, di mana mewajibkan kepada seluruh perangkat desa Wanareja untuk datang ke kantor desa Wanareja pukul 07.00 WIB, yang dibuktikan dengan absensi serta memberikan hukuman bagi pelanggarnya dan mengikuti pelatihan, di mana pelatihan yang diselenggarakan oleh perangkat desa Wanareja kepada seluruh perangkat yang ada melalui seminar, workshop dan studi banding ke pulau Jawa dan daerah lainnya di Indonesia, yang diperuntukkan agar kualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat semakin membaik, sehingga kepercayaan pun akan semakin meningkat dan menyadarkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di desa Wanareja.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat disajikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya para perangkat desa Wanareja Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo diberikan pemahaman pentingnya menambah ilmu pengetahuan.
2. Hendaknya semua perangkat desa Wanareja Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo terus diberikan pelatihan agar kinerja perangkat desa semakin membaik.
3. Hendaknya perangkat desa Wanareja Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo bekerjasama dengan masyarakat dalam hal pembangunan dan memberikan sistem transparansi yang berkesinambungan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alwi Hasyim Batubara, “Konsep *Good Governance* Dalam Otonomi Daerah”, *Jurnal Analisis Admisistrasi*, 2006.
- Badan Ramdan dkk, *Abcd Perencanaan desa Bacaan Khusus Untuk Kaum Perempuan dan Masyarakat Miskin*, Jakarta: Inisiatif, 2014.
- Bediono, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, Jakarta: Komite Nasional Kenijakan Governance, 2006.
- Bintoro Tjokroamidjojo, *Good Governance Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- CUI-ITB, “Keterkaitan Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pencapaian *Good Governance*”, *Jurnal Perencanaan Kota dan Wilayah*, 2004.
- Dedi Harianto, “Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Perpustakaan (Ruu Perpustakaan)”, [http://kelembagaan.perpusnas.go.id/Digital\\_Docs/homepage\\_folders/activities/highlight/ruu\\_perpustakaan/naskah\\_akademis.htm](http://kelembagaan.perpusnas.go.id/Digital_Docs/homepage_folders/activities/highlight/ruu_perpustakaan/naskah_akademis.htm), diakses pada 01 September 2016.
- Djuni Pristianto, *Panduan Penyusunan RPJM desa*, Jakarta: Yayasan Penabulu, 2015.
- Ekky Dwi Ferlinda dkk, “Implementasi *Good Governance* Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Studi pada PT. Telkom Banyuwangi”, *Jurnal Administrasi Publik*, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, 2012.
- FCGI, *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance ( Tata Kelola Perusahaan )*, Jakarta: Citra Graha, 2011.
- Friman Hidayat marwadi, “Masâil Asasiyyah Wathaniyyah”, <https://almarwadi.wordpress.com/2013/03/31/keputusan-komisi-a-ijtimalama-komisi-fatwa-majelis-ulama-indonesia-se-indonesia-iv-tahun-2012/>, diakses pada 12 Spetember 2017.
- Hidayatulla, “Penerapan Prinsip *Good Governance* Terhadap Fungsi Dan Tugas Badan Kepegawaian Daerah Pada Proses Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Cpns Di Kabupaten Barru”, Skripsi: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

- Hartinis Yamin, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Komplek Kejaksaan Agung, Cipaayung, 2009.
- Heru Darmawan, *Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Desa*.
- Ismail Marzuki, "Good Corporate Governance Dalam Penyaluran Kredit Perbanka", *Jurnal Ilmiah IKIP MATARAM*, Dosen Program Studi Pendidikan Biologi FPMIPA IKIP Mataram, 2002.
- Lukas William Andypratama dan Ronny H. Mustamu, "Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Pemerintah Keluarga : Studi Deskriptif Pada Distributor Makanan", *Jurnal AGORA*, Program Manajemen Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Kristen Petra, 2013.
- Muhamad Irfan, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Jakarta: Departemen Agama Ri Sekretariat Jenderal Biro Organisasi Dan Tatalaksana, 2006.
- Mustafa Abubakar, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER — 01 /MBU/2011, Penerapan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara, (Jakarta, Badan Usaha Milik Nega, 2011.
- Oldest, "*Good Governance dan Prinsip Governance*", <http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2015/12/pengertian-dan-prinsip-good-governance.html>, diakses pada 05 Juli 2016.
- Taufik Efendi, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, (Jakarta: Pendayagunaan Aparatur Negara, 2008.
- Tim Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Qur'an Tafwid dan Tejermahan*, Jakarta: Magfirah Pustaka, 2008.
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Rista Dewi Anggraini, "Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya", *jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 2011.
- Sayuti Una (ed), *Pedoman Penulisan Skripsi*, Jambi: Fakultas Syari'ah IAIN STS Jambi, 2012.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Thomas, “*Good Governance* dan Penerapannya di Indonesia”, *Jurnal Administrasi Publik*, Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Petra Surabaya, 2013.
- Umar, *Metode Penelitian Untuk Sekripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Violetta Jingga Tadikapury, “Penerapan *Good Governance* (GCG) Pada PT Bank X Tbk Kanwil X”, Skripsi: Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2011.
- Yenny, “Prinsip-Prinsip *Good Governance* Studi Tentang Penerapan Prinsip – Prinsip *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kantor Camat Samarinda Utara Kota Samarinda”, *Journal Ilmu Administrasi Negar*, 2013.
- Yusup Al Subailly, *Fiqh Perbankan Syariah, Pengantar Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Dalam Ilmu Moderen*, Universitas Islam Imam Muhammad Daud Fakultas Syariah, 2014.
- Zulfikri Amanda, “Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”, <http://catatanpamong.blogspot.co.id/2014/01/undang-undang-no-6-tahun-2014-tentang.html>, diakses pada 10 Februari 2017.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

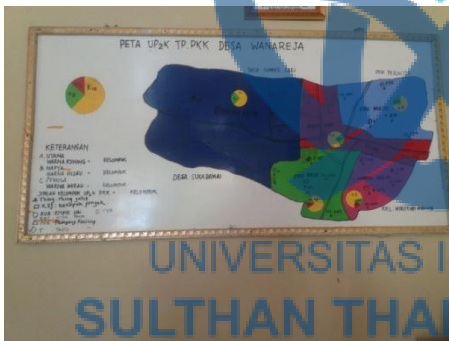


## DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Jabatan
1	Bapak Hendra Budihartapa	selaku Kepala desa Wanareja, 23 September 2017.
2	Bapak Widono	selaku Kepala Urusan Umum dan Perencanaan desa Wanareja, 24 September 2017.
3	Bapak Kartono	selaku Kepala seksi pemerintahan desa Wanareja, 24 September 2017.
4	Bapak Maryono	BPD desa Wanareja di Kantor desa Wanareja, 21 September 2017.
5	Ibu Tatik Rahmati	selaku masyarakat desa Wanareja, 28 September 2017.
6	Bapak Imam Wahyudin	selaku masyarakat desa Wanareja, 28 September 2017.
	Bapak Abdulah Hasibuan	selaku masyarakat desa Wanareja, 28 September 2017.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

## DOKUMENTASI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I





## CURRICULUM VITAE

PHOTO

### A. Informasi Diri

Nama : Abdul Musanif  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat & Tgl. Lahir : 20 November 1994  
NIM : SPI. 130113  
1. Alamat Asal : Desa Wanareja, Unit 10 Kecamatan Rimbo  
ULU  
2. Alamat Sekarang : Rimbo Bujang  
No. Telp/HP : 085208253319  
Nama Ayah : Munari  
Nama Ibu : Santini

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD N 183 Wanareja : Tahun 2007
  - b. MTS Al-Inayah : Tahun 2010
  - c. MA Fathul Huda : Tahun 2013
  - d. UIN STS Jambi : Tahun 2017
2. Pendidikan Non-Formal
  - a. Kursus Komputer di Jambi